



**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 16 ATAS  
AKTIVA TETAP BERWUJUD PADA PT PLN  
(PERSERO) UP3 BINJAI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Pancabudi

Oleh:

**CHRISTINE NATALIA NAPITUPULU**  
NPM 1725100409

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.16 ATAS AKTIVA TETAP BERWUJUD  
PADA PT PLN (PERSERO) UP3 BINJAI

NAMA : CHRISTINE NATALIA NAPITUPULU  
N.P.M : 1725100409  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : Akuntansi  
TANGGAL KELULUSAN : 12 Juli 2024

**DIKETAHUI**

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

**DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Aulia, SE., MM

PEMBIMBING II



Suwarno, S.E., M.M.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHRISTINE NATALIA NAPITUPULU  
NPM : 1725100409  
Fakultas/Program Studi : SOSIAL SAINS/AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 16  
ATAS AKTIVA TETAP BERWUJUD  
PADA PT PLN (PERSERO) UP3 BINJAI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Panca Budi Medan untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Juli 2024



Christine Natalia Napitupulu  
1725100409

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : CHRISTINE NATALIA NAPITUPULU  
Tempat / Tanggal Lahir : Banjarmasin / 15-12-1990  
NPM : 1725100409  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : JL. G. RINJANI, PERM. RINJANI MOUNTAIN  
REGENCY

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 22 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



CHRISTINE NATALIA NAPITUPULU

## **ABSTRAK**

PT PLN (Persero) merupakan salah satu BUMN terbesar di Indonesia dan memiliki jumlah aktiva tetap yang terbanyak di Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya Perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi Aktiva Tetap Berwujud yang sesuai dengan PSAK No. 16. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan PSAK No. 16 atas Aktiva Tetap Berwujud pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai sebagai cabang dari PT PLN (Persero). Di PT PLN (Persero) UP3 Binjai, diketahui bahwa terdapat banyak aktiva tetap yang telah usang dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi namun masih dicatat sebagai aktiva tetap. Hal ini dikhawatirkan dapat membuat pencatatan aktiva tetap tidak akurat karena biaya penyusutan akan terus dihitung padahal aktiva tetap tersebut sudah tidak beroperasi dan tidak dapat menghasilkan pendapatan lagi. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara umum bahwa penerapan PSAK No. 16 mulai dari pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian hingga pengungkapan aset tetap telah sesuai. PT PLN (Persero) UP3 Binjai berkomitmen akan selalu mematuhi dan mengikuti peraturan terbaru PSAK No. 16.

**Kata Kunci: Aktiva Tetap Berwujud, Aset Tetap, PSAK No. 16**

### ***Abstract***

*PT PLN (Persero) is one of the largest state-owned companies in Indonesia and has the largest number of fixed assets in Indonesia. Therefore, it is appropriate for the Company to implement Tangible Fixed Asset accounting policies that are in accordance with PSAK No. 16. This research aims to analyze the implementation of PSAK No. 16 on Tangible Fixed Assets at PT PLN (Persero) UP3 Binjai as a branch of PT PLN (Persero). At PT PLN (Persero) UP3 Binjai, it is known that there are many fixed assets that are obsolete and damaged so that they can no longer be used but are still recorded as fixed assets. It is feared that this could result in inaccurate recording of fixed assets because depreciation costs will continue to be calculated even though the fixed assets are no longer operating and can no longer generate income. This research method uses a qualitative descriptive method using interview techniques, observation and documentation studies. The results of this research indicate in general that the implementation of PSAK No. 16 starting from recognition, measurement, depreciation, retirement to disclosure of fixed assets are appropriate. PT PLN (Persero) UP3 Binjai is committed to always complying with and following the latest PSAK No. 16 regulations.*

***Keywords: Tangible Fixed Assets, Fixed Assets, PSAK No. 16***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penerapan PSAK No. 16 atas Aktiva Tetap Berwujud pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai**”.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Bapak Aulia, SE., MM selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan serta kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Suwarno, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan proposal hingga skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
6. Terima kasih kepada seluruh dosen dan civitas akademik Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya serta motivasi sehingga menjadi mahasiswa yang berilmu dan berakhlak baik
7. Terimakasih juga kepada kedua orang tua saya terkhusus ayah saya yang telah di surga Bapak M. Napitupulu yang sangat menginginkan saya lulus sarjana juga kepada ibu saya R. Harianja yang menyanyangi saya serta adik-adik saya Mey dan Roni yang selalu mendukung dan mencintai saya dengan sepenuh hati.
8. Terimakasih terkhusus kepada suamiku tersayang Franscisco Hutapea dan kedua anakku tercinta Michella Hutapea dan Ken Hutapea yang selalu

memberikan cintanya kepada saya dan mendukung serta mengingatkan saya untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.

9. Terimakasih kepada seluruh teman-teman saya kelas KK II D yang telah berbagi pengalaman dalam menjalani pendidikan di Universitas Panca Budi tercinta ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk ini, bantuan dan bimbingan dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Terimakasih.

Medan, Juli 2024  
Penulis

**Christine Natalia Napitupulu**  
**NPM : 1725100409**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2. Batasan Masalah .....	7
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Tujuan Penelitian .....	7
1.4.2. Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teori .....	10
2.1.1. <i>Grand Theory</i> .....	10
2.1.2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).....	11
2.1.3. Konsep Akuntansi.....	16
2.1.4. Konsep Akuntansi Aktiva Tetap .....	18
2.1.4.1. Pengertian Aktiva Tetap.....	18
2.1.4.2. Jenis-Jenis Aktiva Tetap.....	20
2.1.4.3. Cara Memperoleh Aktiva Tetap.....	22
2.1.4.4. Pengakuan Aktiva Tetap.....	24
2.1.4.5. Pengukuran Aktiva Tetap.....	25
2.1.4.6. Penyusutan Aktiva Tetap.....	27
2.1.4.7. Penghentian Aktiva Tetap.....	31
2.1.4.8. Pengungkapan Aktiva Tetap.....	31
2.2. Penelitian Terdahulu .....	33
2.3. <i>Research Gap</i> .....	37
2.4. Kerangka Pemikiran.....	40
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian .....	42
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43

3.2.1. Lokasi Penelitian .....	43
3.2.2. Waktu Penelitian.....	43
3.3. Definisi Operasional Variabel .....	44
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	45
3.4.1. Jenis Data .....	45
3.4.2. Sumber Data.....	45
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian.....	49
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	49
4.1.1.1 Sejarah Perusahaan .....	49
4.1.1.2 Visi, Misi, Moto, Tujuan dan Tata Nilai Perusahaan .....	54
4.1.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas .....	55
4.1.2.1 Struktur Organisasi .....	55
4.1.2.2 Pembagian Tugas .....	57
4.1.3 Klasifikasi Aktiva Tetap pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai.....	63
4.1.4 Kebijakan Aktiva Tetap di PT PLN (Persero) UP3 Binjai.....	64
4.1.4.1 Pengakuan Aktiva Tetap .....	64
4.1.4.2 Pengukuran Aktiva Tetap.....	65
4.1.4.3 Penyusutan Aktiva Tetap.....	67
4.1.4.4 Penghentian Aktiva Tetap .....	68
4.1.4.5 Pengungkapan Aktiva Tetap.....	69
4.2 Pembahasan .....	70
4.2.1 Pengakuan Aktiva Tetap.....	70
4.2.2 Pengukuran Aktiva Tetap .....	72
4.2.2.1 Pengukuran Saat Pengakuan.....	72
4.2.2.2 Pengukuran Setelah Pengakuan .....	79
4.2.3 Penyusutan Aktiva Tetap .....	82
4.2.4 Penghentian Aktiva Tetap.....	86
4.2.5 Pengungkapan Aktiva Tetap .....	89
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan .....	93
5.2 Saran .....	94

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Jumlah Aktiva Tetap PT PLN (Persero) UP3 Binjai .....	4
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	33
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian .....	43
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel .....	44
Tabel 4.1 Perbandingan Pengakuan Aset Tetap PSAK No. 16 dengan PT PLN (Persero) UP3 Binjai.....	72
Tabel 4.2 Rincian Pengakuan Aset Tetap PT PLN (Persero) UP3 Binjai dari PDP .....	73
Tabel 4.3 Jurnal Transaksi Pengakuan Aset Tetap PT PLN (Persero) UP3 Binjai.....	74
Tabel 4.4 Jurnal Transaksi Pengakuan Aset Tetap PT PLN (Persero) UP3 Binjai.....	74
Tabel 4.5 Rincian Pengakuan Aset Tetap PT PLN (Persero) UP3 Binjai Perolehan dari Kapitalisasi Pemakaian Persediaan Material .....	75
Tabel 4.6 Jurnal Transaksi Pengakuan Aset Tetap PT PLN (Persero) UP3 Binjai.....	75
Tabel 4.7 Perbandingan Nilai Perolehan Aset.....	76
Tabel 4.8 Perolehan Aset Tetap Tahun 2019 di PT PLN (Persero) UP3 Binjai.....	78
Tabel 4.9 Perbandingan Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap PSAK No. 16 dengan PT PLN (Persero) UP3 Binjai .....	79
Tabel 4.10 Penyajian Aset Tetap PT PLN (Persero) UP3 Binjai .....	80
Tabel 4.11 Perbandingan Pengukuran Setelah Pengakuan Aset Tetap PSAK No. 16 dengan PT PLN (Persero) UP3 Binjai.....	82
Tabel 4.12 Perbandingan Penyusutan Aset Tetap PSAK No. 16 dengan PT PLN (Persero) UP3 Binjai.....	86
Tabel 4.13 Perbandingan Penghentian Pengakuan Aset Tetap PSAK No. 16 dengan PT PLN (Persero) UP3 Binjai .....	89
Tabel 4.14 Perbandingan Penghentian Pengakuan Aset Tetap PSAK No. 16 dengan PT PLN (Persero) UP3 Binjai .....	91

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1 Logo PT PLN (Persero) UP3 Binjai.....	55
Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) UP3 Binjai.....	56

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Pengantar Riset/Penelitian/Observasi
- Lampiran 2 Surat Izin Permohonan Riset
- Lampiran 3 Ringkasan Wawancara dengan Narasumber dari Pegawai PT PLN (Persero) UP3 Binjai
- Lampiran 4 Neraca Keuangan PT PLN (Persero) UP3 Binjai per 31 Desember 2019

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis memiliki kegiatan tertentu untuk mencapai tujuannya, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan utama didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang, mempertahankan eksistensinya, pertumbuhan perusahaan yang terus-menerus dan kesan yang positif di mata publik. Tujuan perusahaan dapat tercapai jika perusahaan dikelola dengan baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perusahaan membutuhkan berbagai macam faktor pendukung dalam menjalankan kegiatannya. Salah satu faktor yang dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan adalah dengan adanya aktiva tetap/aset tetap. Aset tetap merupakan bagian terpenting dari sebuah perusahaan yang harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan manfaat bagi perusahaan, sekaligus mendorong tercapainya tujuan perusahaan. Bukan hanya itu, aset tetap selain digunakan sebagai modal kerja, juga digunakan sebagai alat investasi jangka panjang oleh perusahaan. Mengingat pentingnya peranan aset tetap dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk memperoleh aset tetap tersebut maka dibutuhkan suatu perlakuan akuntansi aset yang baik dan benar terhadap setiap aset yang dimiliki perusahaan, yang mencakup penentuan dan pencatatan harga perolehan, penyusutan aset tetap, biaya pemeliharaan selama aset tetap tersebut digunakan dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan. Selain itu, pengelolaan aset tetap yang

baik dan benar dapat mempermudah manajemen perusahaan dan para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan PSAK No. 16 Tahun 2018, Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Aktiva tetap terdiri atas Aktiva Tetap Berwujud dan Aktiva Tetap Tidak Berwujud.

Menurut Rudianto (2017), Aktiva Tetap Berwujud memiliki karakteristik yaitu mempunyai wujud fisik, tidak untuk diperjualbelikan, mempunyai nilai material yang tinggi, memberikan banyak manfaat pada masa yang akan datang, mempunyai periode manfaat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dan digunakan dalam aktivitas normal perusahaan. Aktiva Tetap Berwujud sendiri memiliki berbagai jenis yaitu tanah, bangunan, mesin, perlengkapan dan kendaraan bermotor. Cara untuk memperoleh aset tetap ini adalah dengan pembelian tunai atau kredit, sewa guna usaha (*leasing*), ditukar dengan surat-surat berharga, dan donasi atau hibah. Keseluruhan jenis aset tetap ini tercatat dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai salah satu ukuran kekayaan suatu perusahaan.

Dalam perjalanannya, aset tetap akan digunakan terus-menerus selama aset tersebut dapat digunakan. Aset tetap ini akan mengalami penyusutan setiap tahunnya, sehingga pada masanya aset tetap tersebut akan mengalami penurunan nilai ekonomis dan manfaatnya. Untuk mempertahankan nilai ekonomis dan manfaatnya maka perusahaan akan melakukan pemeliharaan. Jika aset tersebut

rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi maupun jika sudah habis masa manfaatnya maka aset tersebut akan mengalami penghentian pengakuan.

PT PLN (Persero) adalah satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan yang didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia per tahun 2019, PT PLN (Persero) adalah perusahaan dengan total aset terbesar di Indonesia yang memiliki nilai aset sebesar Rp. 1.379,07 Triliun. Oleh karena itu, PT PLN (Persero) wajib memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sehingga Pemerintah dan Manajemen Perusahaan dapat membuat kebijakan yang tepat dalam pengambilan keputusan perusahaan khususnya dalam mengelola aset tetap perusahaan.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai aktiva tetap yang ada di PT PLN (Persero) khususnya di PT PLN (Persero) UP3 Binjai. Berdasarkan Laporan Keuangan yang sudah di-audit per Desember 2019, PT PLN (Persero) UP3 Binjai secara keseluruhan memiliki aktiva tetap bersih/netto sebesar Rp. 1.300.713.221.714 yang tersebar dalam bentuk:

**Tabel 1.1 Jumlah Aktiva Tetap PT PLN (Persero) UP3 Binjai**

No	Jenis Aktiva Tetap	Aktiva Tetap (Bruto) (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Akumulasi Rugi Penurunan Nilai (ARNP) (Rp)	Aktiva Tetap (Netto) (Rp)
1.	Tanah dan hak atas tanah	47.606.323.526	0	0	4.760.632.3526
2.	Bangunan & kelengkapan halaman	30.248.515.683	-846.814.584	-1.163.716.446	28.237.984.653
3.	Instalasi dan mesin	1.184.614.812	-51.066.942	0	1.133.547.870
4.	Perlengk. penyaluran tng listrik	848.070.353	-22.920.824	0	825.149.529
5.	Jaringan distribusi	721.479.608.589	-16.833.033.590	0	704.646.574.999
6.	Gardu distribusi	267.784.582.007	-9.418.667.373	0	258.365.914.634
7.	Perlengkapan lain-lain distribusi	268.069.214.760	-9.453.641.605	0	258.615.573.155
8.	Perlengkapan pengolahan data	355.462.778	-214.276.719	0	141.186.059
9.	Perlengkapan telekomunikasi	205.212.580	-14.339.085	0	190.873.495
10.	Perlengkapan umum	8.197.198.806	-7.662.234.360	0	534.964.446
11.	Kend. bermotor & alat2 yg mobil	8.713.303.297	-8.298.173.949	0	415.129.348
<b>Total</b>		<b>1.354.692.107.191</b>	<b>-52.815.169.031</b>	<b>-1.163.716.446</b>	<b>1.300.713.221.714</b>

Sumber: Laporan Keuangan PT PLN (Persero) UP3 Binjai per 31 Desember 2019

Pada tabel 1.1 di atas dapat kita lihat bahwa aktiva tetap yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) UP3 Binjai per Desember 2019 memiliki nilai aset yang cukup besar yaitu sekitar Rp. 1,3 Trilyun dengan rincian aset bruto sebesar Rp1.354.692.107.191,00 akumulasi penyusutan sebesar -Rp52.815.169.031,00 Akumulasi Rugi Penurunan Nilai (ARP) sebesar -Rp1.163.716.446,00 dan Aset Netto sebesar Rp1.300.713.221.714,00. PT PLN (Persero) UP3 Binjai sendiri memiliki satu (1) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Binjai (UP3 Binjai) dan sembilan (9) Unit Layanan Pelanggan (ULP) yang terdiri atas ULP Binjai Kota, ULP Binjai Timur, ULP Binjai Barat, ULP Stabat, ULP Tanjung Pura, ULP Gebang, ULP Pangkalan Brandan, ULP Pangkalan Susu dan ULP Kuala. Dapat kita lihat bahwa seluruh aktiva tetap yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) UP3 Binjai berbentuk Aktiva Tetap Berwujud. Keseluruhan aktiva tetap yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) UP3 Binjai juga telah memiliki perhitungan penyusutan pada masing-masing jenis aktiva tetapnya. Besarnya aset yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) UP3 Binjai ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui apakah pencatatan asetnya telah sesuai dengan PSAK No. 16 Tahun 2018 mulai dari pengakuan, pengukuran saat pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penghentian pengakuan, pengungkapan, penyusutan hingga penarikan serta penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini sangat penting diketahui mengingat PT PLN (Persero) sendiri adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana perannya sangat penting dalam menunjang kebutuhan listrik masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah kerja PT PLN (Persero) UP3 Binjai.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan PSAK No. 16 atas Aktiva Tetap Berwujud pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai”**.

## **1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Sebuah Perusahaan sudah selayaknya memiliki Laporan Keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) khususnya dalam pencatatan Aktiva Tetap yang tertuang dalam PSAK No. 16 Tahun 2018. Berdasarkan observasi langsung peneliti ke kantor PT PLN (Persero) UP3 Binjai, peneliti mendapati bahwa adanya jenis material yang sama serta tahun perolehan sama namun setelah dibukukan menjadi aset, nilai perolehannya berbeda satu sama lain. Hal ini menyebabkan peneliti masih meragukan bagaimana perhitungan nilai perolehan awal suatu material menjadi aset dibukukan dan dikhawatirkan dapat membuat pengelolaan aktiva tetap tidak terkontrol dengan baik dan tidak sesuai dengan PSAK.

Selain itu, saat observasi ke Gudang PT PLN (Persero) UP3 Binjai, terdapat banyak aktiva tetap yang telah usang dan rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi namun masih dicatat sebagai aktiva tetap. Hal ini juga dikhawatirkan dapat membuat pencatatan aktiva tetap tidak akurat karena biaya penyusutan akan terus dihitung padahal aktiva tetap tersebut sudah tidak beroperasi dan tidak dapat menghasilkan pendapatan lagi.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi ruang lingkungannya hanya pada perlakuan akuntansi atas aktiva tetap berwujud pada jenis aset gardu distribusi khususnya aset transformator/trafo yang ada di PT PLN (Persero) UP3 Binjai pada tahun 2019. Sedangkan pada PSAK No. 16, penelitian dilakukan mulai dari pengakuan, pengukuran saat pengakuan, pengukuran setelah pengakuan, penghentian pengakuan hingga pengungkapan aktiva tetap berwujud.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah yang diangkat mengenai aktiva tetap maka terdapat perumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan akuntansi aktiva tetap pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai?
2. Bagaimanakah kesesuaian antara penyajian, pengakuan, pengukuran, penyusutan, pengungkapan dan penarikan aktiva tetap menurut PSAK No. 16 atas aktiva tetap pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai?

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi aktiva tetap pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai.

2. Untuk mengetahui kesesuaian antara penyajian, pengakuan, pengukuran, penyusutan, pengungkapan, dan penarikan akuntansi aktiva tetap menurut PSAK No. 16 pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan akuntansi pada aktiva tetap berwujud dengan menggunakan dasar PSAK No. 16.

##### **2. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang bagaimana penerapan PSAK No. 16 di PT PLN (Persero) UP3 Binjai.

##### **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya di waktu yang akan datang.

#### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Natalina Punisingon<sup>1</sup>, Harijanto Sabijono<sup>2</sup> dan Sintje Rondowunu<sup>3</sup> (2018) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi yang berjudul **“Analisis Penerapan PSAK No. 16 tentang Aset Tetap pada PT. Bank Sulutgo”**. Sedangkan penelitian ini berjudul **“Analisis Penerapan PSAK No. 16 atas Aktiva Tetap Berwujud pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai.**

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

- 1. Variabel Penelitian:** peneliti terdahulu menggunakan 1 (satu) variabel yang diteliti yaitu Aktiva Tetap (secara keseluruhan), sedangkan penelitian ini menggunakan 1 (satu) variabel yang diteliti yaitu hanya Aktiva Tetap Berwujud.
- 2. Waktu Penelitian:** penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2018 dengan PSAK No. 16 Revisi 2011, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 dengan PSAK No. 16 Revisi 2018.
- 3. Lokasi Penelitian:** lokasi penelitian terdahulu dilakukan di **PT. Bank Sulutgo**, sedangkan penelitian ini dilakukan di **PT PLN (Persero) UP3 Binjai**.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Grand Theory***

*Grand theory* yang menjadi dasar pada penelitian ini adalah teori *stakeholder*. Teori *stakeholder* pada dasarnya menyatakan bahwa perusahaan merupakan suatu entitas yang tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri melainkan wajib memberikan manfaat bagi pemegang kepentingan atau *stakeholdernya*. *Stakeholder* di sini meliputi kreditor, *supplier*, pemegang saham, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan pihak berkepentingan lainnya. *Stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Teori *stakeholder* menggambarkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan bagi pemilik dan investor yang dapat disebut sebagai *shareholders* melainkan juga bertanggung jawab dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, lingkungan sosial dan pemerintah yang dapat disebut sebagai *stakeholders*.

Sesuai dengan definisinya, *stakeholder* memegang peranan penting terhadap keberlangsungan perusahaan. Hal ini dikarenakan *stakeholder* memiliki kemampuan dalam mengendalikan sumber daya yang diperlukan dalam keberlangsungan hidup perusahaan. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder* atau para pemangku kepentingan dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan mereka, terutama *stakeholder* yang mempunyai kekuatan terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan,

seperti tenaga kerja, pelanggan dan pemilik yang disampaikan oleh Hörisch (2014). Seperti yang disampaikan Hörisch (2020), upaya yang dilakukan dalam menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan dan untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak maka dapat diterbitkan *sustainability report*. Dalam *sustainability report* terdapat informasi yang transparan terkait dengan posisi dan aktivitas perusahaan terhadap aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. Sehingga dengan diterbitkannya *sustainability report* maka kinerja perusahaan dapat dinilai secara langsung oleh *stakeholder* yang nantinya akan mempengaruhi keputusan *stakeholder* dalam memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Melalui pengungkapan *sustainability report* maka diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para *stakeholder*.

### **2.1.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu kerangka dari prosedur pembuatan laporan keuangan akuntansi yang berisi peraturan mengenai pencatatan, penyusunan, perlakuan dan penyajian laporan keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berjalan dan telah disepakati serta telah disahkan oleh institute atau lembaga resmi Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Keuangan yang memiliki tujuan umum (*general purpose financial statement*) untuk bisa dibandingkan dengan baik dengan laporan keuangan sebelumnya ataupun laporan keuangan lain. PSAK menyajikan informasi

mengenai entitas meliputi: Aset, Ekuitas, Liabilitas, Pendapatan dan Beban termasuk keuntungan dan kerugian, Arus Kas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas Laporan Keuangan.

Adanya standar yang telah ditetapkan tersebut akan membantu dalam melakukan pengecekan. Selain itu, data yang telah dibuat tersebut juga akan lebih mudah terbaca, lebih mudah dalam penganalisaan dan memudahkan pengguna Laporan Keuangan dalam membandingkan hasil Laporan Keuangan tahun sebelumnya.

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia telah berkembang menjadi empat (4) pilar, yaitu:

1. PSAK – IFRS (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – International Financial Report Standard)

PSAK adalah perubahan nama terbaru dari SAK yang disusun dan diterbitkan oleh DSAK pada tahun 2012. Penyusunan PSAK ini mengikuti standar yang digunakan oleh IFRS atau *International Financial Reporting Standards* dengan menyesuaikan pada kondisi bisnis di Indonesia. Pembuatan dan penyusunan PSAK ini menjadi standar dalam pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan.

Adanya standar yang sesuai dengan PSAK ini membuat semua informasi keuangan yang ada mudah dipahami dan relevan bagi semua pengguna laporan keuangan tersebut. Penyusunan laporan keuangan berdasarkan jenis PSAK ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang tergolong ke dalam perusahaan

publik. Pemilihan IFRS sebagai pedoman bagi PSAK adalah karena adanya penilaian transaksi dan evaluasi pada laporan keuangan.

Adanya penilaian dan evaluasi ini dapat mencerminkan kondisi ekonomi secara nyata. Penerapan IFRS sendiri juga memberikan beberapa manfaat seperti meningkatkan daya banding dari laporan keuangan, memberikan informasi yang berkualitas pada pasar modal, hingga meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri. Bagi badan usaha yang akuntabilitasnya publik biasanya menggunakan PSAK-IFRS artinya badan usaha tersebut sudah terdaftar di pasar modal atau mungkin sedang mengajukan pendaftaran di pasar modal sebagai emiten. Contoh badan usaha yang menggunakan PSAK-IFRS ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan dana pensiun.

## 2. PSAK – ETAP (Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntansi Publik)

ETAP merupakan singkatan dari Entitas Tanpa Asuransi Publik. PSAK-ETAP disebut juga sebagai SAK-ETAP yang merupakan penyederhanaan dari PSAK-IFRS. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

SAK ETAP bertujuan untuk menciptakan fleksibilitas dalam penerapannya dan diharapkan memberi kemudahan akses ETAP kepada pendanaan dari perbankan. SAK ETAP merupakan SAK yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis; mengatur transaksi yang dilakukan oleh ETAP; bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi dan relatif tidak berubah selama beberapa tahun.

Dalam SAK-ETAP, tidak dilakukan pencatatan laporan laba rugi guna mempermudah pengguna dalam melakukan analisis. Aset tak berwujud, aset tetap, dan juga properti investasi pasca tanggal perolehan menggunakan harga perolehan untuk menentukan nilainya. SAK-ETAP paling tepat digunakan unit bisnis menengah atau kecil karena bisa membantu pemilik bisnis menyusun laporannya sendiri tanpa bantuan dari pihak lainnya.

### 3. PSAK – Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – Syariah)

Standar Akuntansi Syariah (SAS) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual; penyajian laporan keuangan syariah; akuntansi murabahah; musyarakah; mudharabah; salam; istishna. Lembaga yang menetapkan PSAK-Syariah adalah Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS IAI).

PSAK Syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah dan istishna. Selain standar akuntansi yang harus dijalankan oleh industri bisnis dan syariah di atas, Instansi Pemerintahan juga memiliki kewajiban dalam menjalankan standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya. Laporan keuangan yang dibuat oleh instansi pemerintahan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penyusunan dengan PSAK-Syariah dilakukan secara konseptual tapi dalam implementasinya bisa menggunakan PSAK umum jika dibutuhkan. Contohnya seperti bank Syariah yang akuntabilitasnya publik, sehingga harus menyusun laporannya dengan PSAK umum lalu menganut SAK-Syariah untuk transaksi di dalamnya yang berbasis Syariah.

#### 4. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah, seperti namanya ditujukan untuk entitas pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Pada saat membuat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai pedomannya.

SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dengan adanya SAP diharapkan dapat menjamin

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sehingga terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih.

### **2.1.3 Konsep Akuntansi**

Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk pengambilan keputusan. Akuntansi juga sudah disebut sebagai bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi serta menyampaikan informasi ke berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, kreditor dan regulator.

Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association (AAA) adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi seputar keuangan. Sementara itu, pengertian akuntansi menurut Financial Accounting Standards Board (FASB) adalah suatu aktivitas jasa yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi kuantitatif atau numerik yang nantinya akan digunakan untuk pertimbangan keputusan ekonomi.

Akuntansi (*accounting*) menurut Horngren dan Horrison (2017) adalah Sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Menurut Priharto (2020) bahwa Akuntansi adalah seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan.

Menurut Fess (2016) secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai Sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Menurut Sumarsan (2017) Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi sesuai kejadian yang berhubungan dengan keuangan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut KBBI akuntansi adalah teori dan praktik perakuan, termasuk tanggung jawab, prinsip, standar, kelaziman (kebiasaan) dan semua aktivitasnya; hal yang berhubungan dengan akuntan; seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat sebuah transaksi terhadap suatu kesatuan ekonomi.

Berdasarkan defenisi-definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan.

Aset merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi *semantic* berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain yaitu kewajiban dan ekuitas. Aset merepresentasi potensi jasa jika fisis dan nonfisis yang memungkinkan badan usaha untuk menyediakan barang dan jasa.

Financial Accounting Standards Board (FASB) mendefinsikan aset dalam kerangka konseptualnya sebagai berikut: “*Assets are probable future economic*

*benefits obtained or controlled by a particular entity as a result of past transactions or events*” (Aset adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu).

Menurut Suwardjono (2014), terdapat tiga karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek atau pos dapat disebut aset yaitu:

- (a) manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti,
- (b) dikuasai atau dikendalikan oleh entitas, dan
- (c) timbul akibat transaksi masa lalu.

Kriteria (a) merupakan kriteria utama dan lebih memuat aspek semantik sedangkan kriteria (b) dan (c) lebih memuat aspek pengakuan dari pada *semantic*.

## **2.1.4 Konsep Akuntansi Aktiva Tetap**

### **2.1.4.1 Pengertian Aktiva Tetap**

Berdasarkan PSAK No. 16 Tahun 2018, Aktiva Tetap atau Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam

rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Menurut Baridwan (2015), aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah permanen menunjukkan sifat di mana aset yang bersangkutan dapat digunakan dalam waktu yang relatif lama. Menurut Carl S. Warren, dkk (2015) mengatakan bahwa Aset tetap ialah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen seperti peralatan, mesin, gedung dan tanah. Sementara itu, aktiva tetap berwujud (*tangible fixed asset*) merupakan aktiva tetap yang memiliki bentuk fisik dan memiliki sifat yang relatif permanen yang dipergunakan dalam kegiatan perusahaan normal. Contoh: tanah, gedung atau bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dll. Menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2017), karakteristik aset tetap adalah asset-aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali, bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan serta memiliki substansi fisik. Sedangkan menurut Samryn (2015), karakteristik aktiva tetap adalah masa manfaatnya lebih dari satu tahun, digunakan dalam membantu aktivitas perusahaan namun tidak untuk dijual atau digunakan sebagai bahan untuk melengkapi produk.

Berdasarkan pengertian-pengertian menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap merupakan sumber daya dalam bentuk harta benda maupun hak yang dikuasai oleh suatu perusahaan dan digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

Umumnya, perlakuan Akuntansi atas Aktiva Tetap terbagi atas beberapa fase, yaitu:

- a. Fase Perolehan Aktiva Tetap adalah fase di mana aset tetap diperoleh hingga aset tetap tersebut dapat digunakan atau berfungsi. Permasalahan yang timbul pada fase ini meliputi: perolehan, pemasangan, penilaian, pengakuan, dan pelaporan atas aset tetap.
- b. Fase Penggunaan Aset Tetap adalah fase di mana aset tetap sudah dan sedang dioperasikan. Permasalahan yang timbul pada fase ini: pengeluaran, penyusutan & amortisasi dan penilaian kembali/revaluasi.
- c. Fase Penarikan Aktiva Tetap adalah fase di mana aset tetap sudah habis masa manfaatnya dan dilakukan penarikan, sehingga tidak menjadi aset lagi.

#### **2.1.4.2 Jenis-jenis Aktiva Tetap**

Menurut S. Munawir (2014), jenis-jenis aktiva tetap berwujud terdiri atas:

1. Tanah: yang di atasnya didirikan bangunan atau dipergunakan untuk operasional seperti lahan parkir, halaman, lapangan, dll.
2. Bangunan: dipergunakan operasional perusahaan seperti gedung kantor, toko maupun pabrik.
3. Mesin produksi.
4. Inventaris atau barang-barang yang menunjang produksi
5. Perlengkapan: alat-alat yang mencakup aset yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan.
6. Kendaraan Bermotor.

Sedangkan, aktiva tetap tidak berwujud adalah aset suatu perusahaan yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki umur ekonomis lebih dari satu tahun. Aktiva tetap tidak berwujud ini biasanya memberikan keuntungan tersendiri yang dapat diakui sebagai penghasilan bagi perusahaan. Contoh aktiva tetap tidak berwujud yaitu:

1. Hak paten merupakan hak khusus yang diberikan kepada suatu Perusahaan dan menjadi bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Hak paten diberikan kepada seseorang atau Perusahaan yang berhasil membuat penemuan tertentu, di mana hasil penemuan tersebut dapat digunakan oleh banyak orang. Hak paten berlaku selama 17 tahun dan jika orang lain atau badan lain ingin menggunakannya maka harus mendapatkan izin dari penemunya terlebih dahulu.
2. *Goodwill* merupakan aktiva tetap tidak berwujud yang melekat dengan nilai suatu Perusahaan. *Goodwill* dapat dijual namun penjualannya harus dilakukan secara total bersamaan dengan seluruh Perusahaan. Hal ini mencakup nilai yang melekat dalam suatu Perusahaan yang dapat memberi citra positif.
3. Lisensi, yang diberikan dalam lisensi adalah hak untuk menjual sebagian atau sejumlah barang atau jasa kepada pihak tertentu. Tidak hanya barang atau jasa tetapi juga dapat berupa merek dagang yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketika orang atau Perusahaan memiliki lisensi maka otomatis mereka punya otoritas atau hak untuk menggunakan barang atau jasa

yang dibelinya. Tanpa lisensi maka penggunaan barang maupun jasa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran dan diproses kepada pihak yang berwajib.

4. Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis timbul ketika hal-hal baru diciptakan. Hak cipta biasanya mendapatkan perlindungan dari badan hukum sehingga penggunaannya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Plagiarism atau duplikasi dilarang dilakukan apabila suatu karya sudah memiliki hak cipta.

#### **2.1.4.3 Cara Memperoleh Aktiva Tetap**

Cara-cara memperoleh aktiva tetap yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pembelian Tunai**

Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Jumlahnya termasuk harga yang tercantum di faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aktiva tetap tersebut siap dipakai. Biaya-biaya tersebut adalah biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, biaya balik nama, biaya pemasangan dan biaya percobaan. Semua biaya tersebut dikapitalisasi sebagai harga perolehan aktiva tetap.

##### **2. Pembelian Angsuran**

Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran maka dalam harga perolehan tetap tidak boleh termasuk bunga. Cara pencatatannya adalah pembayaran setiap tahun dibuat jurnal yang mengurangi utang sebesar pokok pinjaman yang dilunasi dan mendebit biaya bunga untuk tahun yang bersangkutan dan kreditnya kas sebesar angsuran.

### 3. Ditukar dengan Surat-surat Berharga

Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi tidak diketahui maka harga perolehan aktiva tetap ditentukan sebesar harga pasar aktiva tersebut. Apabila harga pasar surat berharga dan aktiva tetap yang ditukar keduanya tidak diketahui maka dalam keadaan seperti ini nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan perusahaan. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga perolehan aktiva tetap dan nilai-nilai surat berharga yang dikeluarkan.

### 4. Ditukar dengan Aktiva Tetap yang Lain

Aktiva lama digunakan untuk membayar aktiva baru baik seluruhnya maupun sebagian di mana kekurangannya dibayar tunai. Kondisi seperti ini prinsip harga perolehan harus tetap digunakan, yaitu aktiva baru dikapitalisasi dengan jumlah sebesar harga aktiva lama ditambah uang yang dibayarkan atau dikapitalisasi sebesar harga pasar aktiva baru yang diterima.

### 5. Diperoleh dari Hadiah atas Donasi

Aktiva yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasar. Depresiasi atau penyusutan aktiva tetap yang diterima dari hadiah dihitung dengan cara yang sama dengan aktiva tetap yang lain.

## 6. Aktiva yang Dibuat Sendiri

Terkadang beberapa perusahaan membuat aktiva tetap sendiri, misalnya gedung, alat-alat dan perabot. Semua biaya yang dibebankan untuk pembuatan aktiva tetap sendiri seperti bahan, upah langsung dan *factory overhead* langsung tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok akktiva tetap yang dibuat. Biaya-biaya lain yang timbul dalam masa pembuatan aktiva dibebankan sebagai harga perolehan aktiva tetap

### 2.1.4.4 Pengakuan Aktiva Tetap

Dalam PSAK 16 paragraf 7, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut. Dikatakan ‘memiliki manfaat ekonomis’ masa depan apabila:
  - a. Perpanjangan estimasi masa manfaat aset
  - b. Peningkatan kapasitas
  - c. Perbaikan kualitas keluaran (*output*) secara substansial
  - d. Penurunan biaya operasi yang dinilai sebelumnya secara substansial.
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Entitas tidak boleh mengakui biaya perawatan sehari-hari aset tetap sebagai bagian dari aset bersangkutan. Biaya-biaya ini diakui dalam laba-rugi saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari terutama terdiri atas biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai, termasuk di dalamnya suku cadang kecil. Pengeluaran untuk hal tersebut sering disebut

“biaya pemeliharaan dan perbaikan” aset tetap. Terkecuali jika pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran yang signifikan yang mengakibatkan entitas memperoleh manfaat ekonomis masa depan, maka pengeluaran itu dapat diklasifikasikan sebagai pengeluaran modal dan nilainya dikapitalisasi ke dalam aset tetap

#### **2.1.4.5 Pengukuran Aktiva Tetap**

##### **1. Pengukuran Saat Pengakuan**

Dalam PSAK No. 16 Paragraf 15 dikatakan bahwa aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan melampaui jangka waktu kredit normal, maka perbedaan antara harga tunai dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasi. Biaya perolehan aset meliputi:

- a. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain.
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
- c. Estimasi biaya awal pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

## 2. Pengukuran Setelah Pengakuan

PSAK No. 16 menyebutkan ada dua model pengukuran aset tetap setelah pengakuan, yaitu:

- a. Model Biaya, yaitu setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
- b. Model Revaluasi, yaitu setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan.

Jika suatu aset tetap direvaluasi, maka seluruh aset tetap dalam kelas yang sama direvaluasi. Jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Akan tetapi, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Jika jumlah tercatat aset turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui dalam laba rugi. Akan tetapi, penurunan nilai tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain sepanjang tidak melebihi saldo surplus

revaluasi untuk aset tersebut. Penurunan nilai yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tersebut mengurangi jumlah akumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Jika entitas mengubah kebijakan akuntansi dari model biaya ke model revaluasi dalam pengukuran aset tetap, maka perubahan tersebut berlaku secara prospektif.

#### **2.1.4.6 Penyusutan Aktiva Tetap**

Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi (PSAK No. 16). Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Dwi Martani (2016), penyusutan adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat dari aset tersebut. Sedangkan menurut Kieso, Weygandt dan Warfield (2018) “Penyusutan (*depreciation*) adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset berwujud kepada beban secara sistematis dan rasional pada periode-periode dimana perusahaan mengharapkan manfaat dari penggunaan asset.”

Sementara Warren, et.al (2017) menyebutkan bahwa “Penyusutan (*depreciation*) ialah pemindahan biaya ke beban secara berkala”. Selain itu, Menurut SAK EMKM (2018) “Penyusutan (Depresiasi) adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset selama umur manfaatnya”.

Dan menurut Martani, et.al (2019) “Depresiasi adalah metode pengalokasian biaya aset tetap untuk menyusutkan nilai aset secara sistematis selama periode manfaat aset tersebut”.

Secara berkala, semua aset tetap, kecuali tanah akan mengalami penyusutan atau penurunan kemampuan dalam menyediakan manfaat. Dengan adanya penyusutan maka nilai dari aset tetap tercatat tidak lagi dapat mewakili nilai dari manfaat yang dimiliki aset tersebut. Agar nilai aset tetap dapat memiliki nilai dari manfaat yang dimilikinya maka perlu dilakukan pengalokasian manfaat atas aset tetap ke dalam akumulasi biaya secara sistematis berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap.

Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang:

1. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi, dan
2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas, dan
3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

Masa manfaat adalah:

- a. Periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan; atau
- b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh Perusahaan

Hal-hal yang harus dipahami mengenai penyusutan yaitu:

1. Jumlah Tersusutkan dan Periode Penyusutan

Jumlah yang dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisanya.

Faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan:

- a. Harga perolehan, yaitu sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan.
- b. Nilai residu, yaitu nilai sisa atau taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aset tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian aktiva.
- c. Umur ekonomis aktiva, terbagi 2:
  - Umur fisik apabila fisik aktiva tersebut masih dalam kondisi baik walaupun fungsinya mungkin sudah menurun.
  - Umur fungsional apabila aktiva tersebut masih memberikan kontribusi kepada perusahaan.

## 2. Metode Penyusutan

Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dikelompokkan menurut kriteria berikut:

### a. Metode Penyusutan Garis Lurus

Metode ini adalah metode depresiasi aset tetap yang biaya penyusutannya tetap sama setiap tahunnya hingga akhir usia ekonomis aset tersebut. Metode ini digunakan jika nilai ekonomis aset tetap terus sama setiap tahun. Fungsinya adalah untuk menyusutkan aset-aset yang manfaatnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume jasa atau produk yang diproduksi seperti peralatan kantor dan bangunan.

Ada 2 cara menghitungnya:

#### 1. Dengan menggunakan nilai sisa:

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Umur ekonomis}}$$

2. Tanpa ada nilai sisa:

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Umur ekonomis}}$$

b. Metode Saldo Menurun Ganda

Metode yang ditentukan berdasarkan persentasi tertentu dari harga buku pada periode tertentu.

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} \times 2}{\text{Umur Ekonomis}}$$

c. Metode Unit Produksi

Metode ini menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diperkirakan dari aset. Rumus untuk menghitung penyusutan dengan metode ini, yaitu:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Residu}}{\text{Taksiran Hasil Produksi (Unit)}}$$

#### 2.1.4.7 Penghentian Aktiva Tetap

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya:

- a. Pada saat pelepasan; atau
- b. Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya. Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya.

#### **2.1.4.8 Pengungkapan Aktiva Tetap**

PSAK No. 16 Paragraf 73 menyatakan bahwa Laporan Keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap:

1. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
5. Rekonsiliasi jumlah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a. Penambahan.
  - b. Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk dijual dan Operasi yang Dihentikan dan pelepasan lain.
  - c. Perolehan melalui kombinasi bisnis.
  - d. Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai dengan paragraf 31, 39 dan 40 serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam

penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset.

- e. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48.
- f. Pembalikan rugi penurunan nilai dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48.
- g. Penyusutan.
- h. Selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadimata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang dari pelaporan entitas pelapor.
- i. Perubahan lain.

Laporan keuangan juga mengungkapkan:

1. Keberadaan dan jumlah pembatasan atas hak milik dan aset tetap yang dijaminakan untuk liabilitas.
2. Jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam konstruksi
3. Jumlah komitmen kontraktual untuk memperoleh aset tetap
4. Jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang termasuk dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menjadi acuan penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian yang telah penulis peroleh menjadi referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian sebelumnya berupa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

**Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya**

No	Nama/Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ruki Ambar Arum, Erni Cahyani Ibrahim/ 2017	Kebijakan Akuntansi Aktiva Tetap dan Penyusutan Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2011) pada PT. Perkebunan Nusantara XIV Makassar (Unit Usaha PKS Luwu I)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Pengakuan Aset Tetap, Penyusutan Aset Tetap, Pelepasan Aset Tetap dan Pengungkapan Aset Tetap pada PTPN XIV Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 16. Namun, ada sedikit hal yang belum sesuai dengan PSAK No. 16 yaitu perusahaan tidak melakukan <i>review</i> atas nilai residu dan umur manfaat atas aset tetap serta perusahaan tidak mengakui keuntungan atau kerugian disposal aset tetap.
2.	Fina Rohmatul Ummah, Masyhad, Siti Rosyafah/ 2017	Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berwujud	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurang sesuainya tarif penyusutan yang dilakukan oleh

		dan Hubungannya Terhadap Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan pada PT Mulya Jatra Sidoarjo		perusahaan terhadap aktiva tetap sehingga berpengaruh pada kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Terdapat selisih biaya penyusutan mesin sebesar Rp. 144.073.333, selisih penyusutan kendaraan sebesar Rp. 130.466.667 dan selisih biaya penyusutan inventaris kantor sebesar Rp. 23.340.000 dan perhitungan penyusutan yang dilakukan menurut SAK dihitung dari harga perolehan aktiva tetap. Dengan adanya selisih biaya penyusutan yang lebih besar maka akan mengakibatkan akumulasi penyusutan yang disajikan juga terdapat selisih dan juga dengan nilai total aktiva tetap setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan juga akan terdapat selisih. Biaya depresiasi yang dibebankan pada harga pokok produksi tercatat secara wajar dan perhitungan laba rugi menjadi layak.
3.	Devi Lestari Pramita Putri, Nur Khotijah/ 2017	Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap dan Penyajiannya pada Laporan Keuangan	Deskriptif Kualitatif	PT Haka Utama Sejahtera dalam menentukan harga perolehan aktiva tetapnya belum sesuai dengan PSAK No. 16 karena pencatatan harga perolehannya sebesar harga beli yang

		PT Haka Utama Sejahtera Sampang		<p>ada pada nota pembelian dan tidak menambahkan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aktiva tersebut siap untuk digunakan.</p> <p>PT Haka Utama Sejahtera dalam menghitung beban penyusutan belum menerapkan metode penyusutan terhadap semua aktiva tetapnya, hal ini tidaklah sesuai dengan PSAK No. 16. Dalam menyajikan aktiva tetap dalam laporan keuangan, PT Haka Utama Sejahtera tidak memiliki laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi pada umumnya, melainkan perusahaan menyajikan laporan keuangan proyek sehingga aktiva tetapnya tidak disajikan ke dalam laporan keuangan proyek tersebut.</p> <p>Dari temuan di atas, diketahui bahwa perlakuan akuntansi aktiva tetap di PT Haka Utama Sejahtera belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.</p>
4.	Muhammad Bahari Hariadi, Grace B. Nangoi, Anneke Wangkar/ 2018	Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap Berdasarkan PSAK No.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Pengakuan Aset Tetap, Pengeluaran setelah Perolehan Aset Tetap serta Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap pada PT.

		16 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malalayang Manado		Pegadaian (Persero) Cabang Malalayang Manado dibanding PSAK No. 16 telah sesuai.
5.	Moh. Afandy Fariansyah 2018	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar	Analisis deskriptif dan komparatif	<p>Perlakuan Akuntansi Aset Tetap yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar pada prinsipnya sudah mendekati Standar Akuntansi Keuangan. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK No. 16 Revisi 2011.</p> <p>BPJS Ketenagakerjaan Makassar melakukan penaksiran atas masa manfaat atau melakukan penyusutan terhadap aset tetap menggunakan metode garis lurus, pemakaian aset tetap yang telah habis masa manfaatnya terkadang masih tetap digunakan kecuali jika sudah tidak berfungsi dengan baik atau rusak, aset tidak digunakan kembali dalam kegiatan operasional dan dibiarkan dalam perusahaan. Dalam mencatat penyusutan atas aset tetap, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar belum sesuai dengan PSAK No. 16.</p> <p>Pelepasan aset BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar dilakukan</p>

				<p>dengan cara dijual secara lelang, dihibahkan maupun dimusnahkan. Dalam penyajian dan pengungkapan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar secara umum tidak menyimpang dari pola yang terdapat pada Standar Akuntansi Keuangan.</p>
--	--	--	--	--

*Sumber: Data yang Diolah Peneliti (2023)*

### **2.3 Research Gap**

Dikutip dari buku Pengantar Metode Penelitian Manajemen (2020), *research gap* atau celah penelitian merupakan keadaan ditemukannya inkonsistensi atau kesenjangan di antara hasil penelitian dengan data yang ditemukan. *Gap* penelitian ini juga dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan yang terjadi akibat adanya perbedaan hasil, konsep, data maupun teori dari hasil penelitian dengan yang ditemukan di lapangan. Celah ini mengakibatkan peluang untuk melakukan penelitian lanjutan tersedia sehingga peneliti lain dapat memanfaatkannya untuk penelitian.

Dari data penelitian terdahulu yang telah dikumpulkan oleh penulis sesuai tabel

2.1. di atas maka penulis menemukan adanya beberapa *gap* di antaranya:

1. Penelitian oleh Ruki Ambar dan Erni Cahyani (2017) pada PT Perkebunan Nusantara XIV Makassar (Unit Usaha Luwu I) menemukan bahwa beberapa kebijakan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAK No. 16 sudah berjalan

dengan semestinya, kecuali pada *review* atas nilai residu dan umur manfaat aset tetap setiap akhir tahun buku. Penelitian ini memiliki hasil yang sudah lengkap mulai dari pengakuan, penyusutan, pelepasan hingga pengungkapan seluruh jenis aset tetap. Oleh karena itu, peneliti akan menjadikan penelitian ini sebagai acuan penulisan dengan perubahan-perubahan yang diperlukan.

2. Penelitian oleh Fina Rohmatul Ummah, Masyhad, Siti Rosyafah (2017) pada PT Mulya Jatra Sidoarjo hanya meneliti tentang metode penyusutan saja. Berdasarkan hasilnya, perusahaan tersebut tidak menerapkan metode penyusutan garis lurus dengan benar, sehingga menghasilkan ketidaksesuaian hasil yaitu terdapat selisih biaya penyusutan. Hasil penelitian ini tidak selengkap seperti yang diharapkan penulis yang ingin mendapatkan hasil lengkap sesuai dengan PSAK No. 16.
3. Penelitian oleh Devi Lestari Pramita Putri, Nur Khotijah (2017) pada PT Haka Utama Sejahtera Sampang menemukan bahwa adanya beberapa kebijakan akuntansi PSAK No. 16 yang belum sesuai, di antaranya penentuan harga perolehan, metode penyusutan dan penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan. Penelitian ini belum memenuhi persyaratan dalam PSAK No. 16, sehingga belum dapat dijadikan acuan yang baik. Namun memang dalam catatan, peneliti tersebut tidak memiliki informasi yang cukup dalam melakukan penelitiannya karena kurangnya informan yang bisa dimintai informasi serta kurangnya bukti-bukti dokumen keuangan perusahaan.

4. Penelitian oleh Muhammad Bahari Hariadi, Grace B. Nangoi, Anneke Wangkar (2018) pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Malalayang Manado menemukan bahwa pengakuan, pengeluaran, penyajian dan pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan PSAK No. 16, sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan yang baik bagi penulis.
5. Penelitian oleh Moh. Afandy Fariansyah (2018) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar menemukan bahwa pengukuran, pengakuan harga perolehan dan penyusutan aset tetap telah sesuai dengan PSAK No.16. Peneliti juga menjelaskan jenis-jenis aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, sehingga memudahkan pembaca dalam mengerti isi penelitian. Namun peneliti tidak membahas secara menyeluruh mengenai PSAK No. 16 seperti penghentian pengakuan dan pengungkapan aset tetap. Hal ini dirasa penulis lumayan cukup menjadi acuan penelitian tetapi penulis harus menambahkan informasi yang lebih lengkap lagi dalam penelitian penulis.

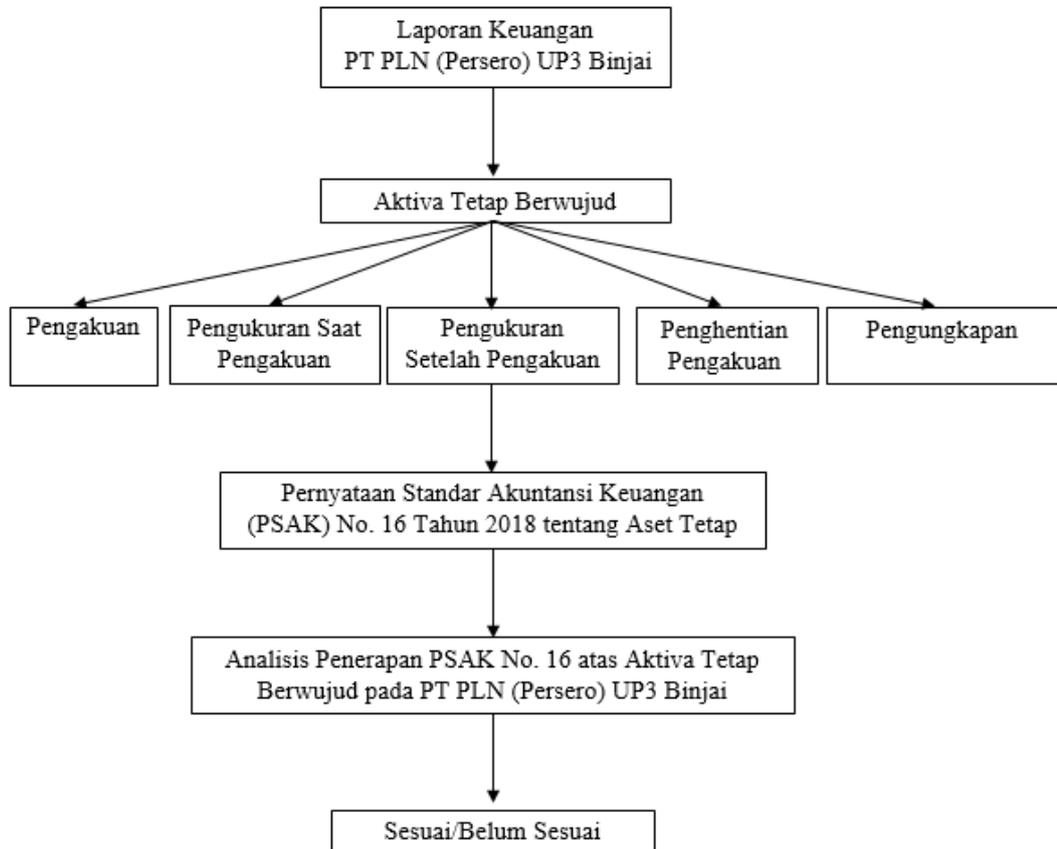
#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Aktiva tetap berwujud merupakan suatu aset yang dimiliki badan usaha yang masa pemakaiannya lebih dari satu tahun, bukan untuk dijual namun dipakai untuk operasional. Proses akuntansi aktiva tetap dimulai saat aktiva tetap itu diperoleh hingga aktiva tetap itu dihapuskan. Agar sebuah perusahaan memiliki laporan keuangan yang akurat, wajar dan kredibel, perusahaan harus memiliki panduan dalam hal penyusunan laporan aktiva tetap atau aset tetap. PSAK No. 16 merupakan panduan yang diakui oleh seluruh perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam hal

perolehan, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian atau penghapusan hingga penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, PT PLN (Persero) UP3 Binjai sebagai salah satu perusahaan BUMN di Indonesia sudah seharusnya mengikuti panduan dari PSAK No. 16 tersebut.

Dari adanya analisis penerapan aktiva tetap berdasarkan PSAK No. 16 maka akan diketahui penerapan akuntansi aktiva tetap pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai apakah telah sesuai atau belum sesuai dengan penerapan akuntansi aktiva tetap berdasarkan PSAK No. 16.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dibuat kerangka pemikiran seperti di bawah ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menjelaskan, menerangkan dan menjawab secara lebih terperinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Selain itu, menurut Albi Anggito, Johan Setiawan (2018), penelitian kualitatif bersifat deskriptif artinya peneliti harus mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau *setting* sosial yang akan dituangkan dalam tulisan naratif. Arti dalam penulisannya, data dan fakta dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta)

yang diungkapkan di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporannya.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variabel yang diteliti. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.

### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara UP3 Binjai yang beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 37, Kel. Pahlawan, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai.

#### 3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Maret 2020				Januari 2024				Februari 2024				Maret 2024				Mei 2024				Juli 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Riset Awal/ Pengajuan Judul		■																						
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■																
3	Perbaikan/ Acc Proposal									■	■	■	■												
4	Seminar Proposal													■											
5	Seminar Hasil																	■							
6	Meja Hijau																							■	

*Sumber: Oleh Penulis (2024)*

### 3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi atau gabungan keduanya, yang ada di lapangan.

**Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Definisi Operasional Variabel</b>
Penerapan PSAK No. 16 atas Aktiva Tetap Berwujud	a. Pengakuan b. Pengukuran c. Pelaporan d. Pengeluaran e. Penyusutan f. Penghentian	a. Sebuah proses penetapan pencatatan suatu kejadian atau peristiwa menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan. b. Sebuah proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan. c. Sebuah proses penjelasan secara naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. d. Suatu pembayaran yang dilakukan untuk kewajiban pada masa akan datang dalam rangka memperoleh keuntungan. e. Suatu alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. f. Suatu pelepasan atas aset tetap yang sudah tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

*Sumber: Data yang Diolah Peneliti (2023)*

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan penulis adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2015), data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Data kualitatif merupakan data yang berdasarkan pada opini dan potensi yang bersifat deskriptif atau data yang berwujud dalam pernyataan-pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

1. Data primer

Menurut KBBI, data primer adalah jenis data utama atau pokok di dalam suatu penelitian. Proses pemerolehan data ini didapatkan langsung dari tangan pertama atau sumber utama dari fenomena yang sedang dikaji. Menurut Umar, data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dari hasil wawancara dan observasi berupa tanya jawab langsung kepada pihak yang berkompeten atau pegawai yang menangani langsung bidang akuntansi pada aktiva tetap berwujud di PT PLN (Persero) UP3 Binjai.

2. Data Sekunder

Menurut Uma Sekaran & Roger Bougie (2017), data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data

sekunder ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh. Data sekunder dapat diperoleh melalui buku-buku, arsip, laporan, publikasi dari pemerintah/swasta, hasil sensus, jurnal dan lain-lain baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang tersedia dan terutama Laporan Keuangan di PT PLN (Persero) UP3 Binjai.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara digunakan ketika peneliti ingin mengetahui pengalaman atau pendapat narasumber mengenai sesuatu secara mendalam. Dalam hal ini, narasumbernya adalah pegawai bagian akuntansi yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan di lingkungan perusahaan. Peneliti akan membuat daftar pertanyaan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### **2. Observasi**

Observasi adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan pengindraan. Observasi dilakukan untuk mendapat gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai suatu peristiwa. Peneliti kemudian

membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan selama observasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

### 3. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumentasi adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Secara umum, dokumen adalah sebuah catatan atau tangkapan dari sebuah peristiwa atau sesuatu sehingga informasi tentang hal tersebut tidak akan hilang. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar amupun video. Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen yang dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebarluaskan kepada pemakai informasi. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumentasi yang berkaitan dengan proses perolehan aset tetap hingga penghapusan aset tetap.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah metodologi dalam penelitian yang dipergunakan untuk mengolah data yang diperoleh seorang peneliti di lapangan menjadi sebuah informasi yang dapat dijelaskan kepada para pembaca sehingga hasil penelitian menjadi mudah dipahami. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya terjadi di perusahaan. Setelah seluruh sumber data penelitian dikumpulkan maka penulis

akan melakukan analisis untuk mengetahui apakah peraturan pada PSAK No. 16 sudah diterapkan dalam Aktiva Tetap Berwujud atau tidak.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang diambil bersumber dari Laporan Keuangan PT PLN (Persero) Tahun 2019.
2. Dokumen yang diperlukan adalah Neraca Laporan Keuangan, Laporan Laba Rugi, rincian Aktiva Tetap Berwujud hingga Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB).
3. Peraturan-peraturan akuntansi perusahaan mengenai perlakuan akuntansi atas Aktiva Tetap Berwujud.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian**

###### **4.1.1.1 Sejarah Perusahaan**

Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai

pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

Tahun 1965, BPU PLN dibubarkan dengan Peraturan Menteri PUT No. 9/PRT/64 dan dengan Peraturan Menteri No. 1/PRT/65 yaitu ditetapkannya pembagian daerah kerja PLN menjadi 15 Kesatuan Daerah Eksploitasi I. Sumatera Utara tetap menjadi Eksploitasi I, maka dengan Keputusan Direksi PLN No. Kpts 009/DIRPLN/66 TANGGAL 14 April 1966, PLN Eksploitasi I dibagi menjadi 4 cabang, yaitu:

- a. Cabang Medan
- b. Cabang Binjai
- c. Cabang Sibolga
- d. Cabang Pematang Siantar

Peraturan Perundang-undangan PP No. 18 tahun 1972 mempertegas kedudukan PLN sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dengan hak, wewenang dan tanggung jawab membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik keseluruh Wilayah Negara RI. Kemudian menyusul peraturan Menteri Perusahaan Umum tenaga Listrik (PUTL) No. 013/PRT/75 yang merubah PLN Eksploitasi menjadi PLN Wilayah. PLN Eksploitasi II menjadi PLN Wilayah II Sumatera Utara. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 231/1994 tanggal 16 Juni 1994 maka ditetapkan status PLN sebagai Persero. Adapun yang membelakangi perubahan status tersebut adalah untuk mengantisipasi kebutuhan listrik yang terus meningkat dewasa.

Berdasarkan syarat keputusan Nomor. 078.K/023.DIR/1996 Tanggal 9 Agustus 1996 dibentuk organisasi baru dibidang jasa pelayanan kelistrikan yaitu PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara. Dengan pembentukan organisasi baru PLN Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian Utara yang terpisah dari PLN Wilayah II, maka fungsi-fungsi Pembangkitan dan Penyaluran yang sebelumnya dikelola PLN Wilayah II berpindah tanggungjawab pengelolaannya ke PLN Pembangkitan dan Penyaluran Sumbagut. Sementara itu PLN Wilayah II berkonsentrasi pada distribusi dan penjualan tenaga listrik.

Dalam pelayanan pendistribusian kelistrikan, PLN membagi-bagi fungsi unit induknya kedalam beberapa unit induk berdasarkan pada sistem tenaga listrik yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Selain itu ada juga unit induk atau pusat-

pusat lain sebagai penunjang berlangsungnya perusahaan. Karena luasnya cakupan wilayah kerja PLN, maka PLN memiliki unit-unit di seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan unit induknya dan dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Kantor Pusat PLN merupakan pusat dari penyelenggara bisnis PLN diseluruh Indonesia. Dimana disinilah para direksi PT. PLN berkantor. Kantor pusat PLN ini terletak di Jalan Trunojoyo Blok M-I Melawai, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Dan kantor pusat dipimpin oleh Direktur Utama
- b. Unit Induk dan/atau Pusat-Pusat merupakan unit dari kantor pusat untuk pelayanan kelistrikan di PLN, serta juga merupakan lembaga penunjang bisnis kelistrikan PLN di wilayah. Unit induk dan/atau Pusat-pusat dipimpin oleh seorang General Manager Unit Induk atau General Manager Pusat.
- c. Unit Pelaksana merupakan unit di bawah unit induk dan/atau pusat-pusat sebagai pembagian wilayah pelayanan PLN kedalam ruang lingkup yang lebih kecil agar pelayanan PLN bisa lebih terfokus dan langsung menyentuh pada masyarakat, contohnya adalah Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yaitu unit pelaksana di bawah unit induk distribusi, Unit Pelaksana Transmisi (UPT) yaitu unit pelaksana di bawah unit induk transmisi.

Unit Layanan merupakan unit dibawah unit pelaksana dengan ruang lingkup pembagian dari wilayah unit pelaksana, misalnya dalam satu unit pelaksana terdapat beberapa unit layanan. Tetapi tidak semua unit pelaksana di PLN mempunyai unit layanan, tergantung pada jumlah pelanggan dan area pelayanan

unit pelaksana PLN, contoh unit layanan pelanggan (ULP) adalah unit layanan di bawah UP3, atau unit layanan transmisi dan gardu induk (ULTG) unit layanan di bawah UPT.

Saat ini PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara memiliki sembilan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) dan satu Unit Pengatur Pengatur Distribusi (UP2D) yaitu:

1. PT PLN (Persero) UP3 Medan
2. PT PLN (Persero) UP3 Utara
3. PT PLN (Persero) UP3 Binjai
4. PT PLN (Persero) UP3 Lubuk Pakam
5. PT PLN (Persero) UP3 Pematang Siantar
6. PT PLN (Persero) UP3 Sibolga
7. PT PLN (Persero) UP3 Rantau Prapat
8. PT PLN (Persero) UP3 Padang Sidempuan
9. PT PLN (Persero) UP3 Nias
10. PT PLN (Persero) UP2D Sumut

Sementara itu, objek penelitian kali ini adalah PT PLN (Persero) UP3 Binjai yang memiliki sembilan Unit Layanan Pelanggan (ULP) pada tahun 2022 yang terdiri atas ULP Binjai Kota, ULP Binjai Timur, ULP Binjai Barat, ULP Stabat, ULP Tanjung Pura, ULP Gebang, ULP Pangkalan Brandan, ULP Pangkalan Susu dan ULP Kuala.

#### **4.1.1.2 Visi, Misi, Moto, Tujuan dan Tata Nilai Perusahaan**

##### **1. Visi PT PLN (Persero)**

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, Unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani

##### **2. Misi PT PLN (Persero)**

Misi PT PLN (Persero) yaitu:

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

##### **3. Moto PT PLN (Persero)**

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik

##### **4. Maksud dan Tujuan Perseroan**

Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

##### **5. Tata Nilai PLN**

Tata Nilai PLN adalah AKHLAK. AKHLAK merupakan akronim dari:

1. AMANAH: Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

2. KOMPETEN: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
3. HARMONIS: Saling peduli dan menghargai perbedaan
4. LOYAL: Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
5. ADAPTIF: Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
6. KOLABORATIF: Membangun kerjasama yang sinergis

#### **4.1.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas**

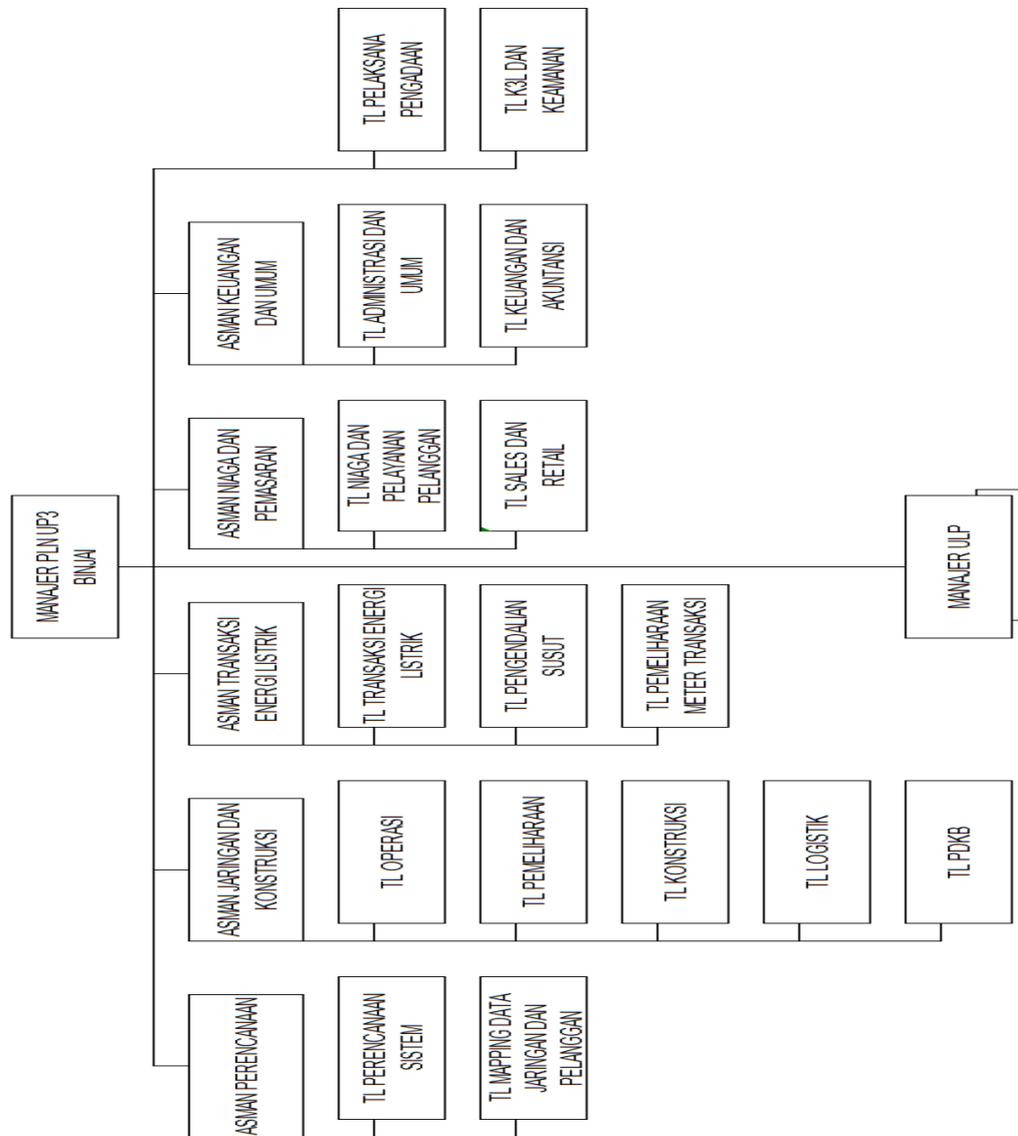
##### **4.1.2.1 Struktur Organisasi**

Setiap perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun swasta mempunyai struktur organisasi, karena perusahaan juga merupakan organisasi. Organisasi adalah suatu sistem dari aktivitas kerjasama yang terstruktur, yang dilaksanakan oleh sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama. Dalam struktur organisasi ditetapkan tugas-tugas wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta bagaimana hubungan satu dengan yang lain. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, PT PLN (Persero) UP3 Binjai memiliki struktur organisasi yang tertata menurut fungsi dan golongannya. Tujuan adanya struktur organisasi adalah untuk pencapaian kerja/pendelegasian dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab.



**Gambar 4.1 Logo PT PLN (Persero) UP3 Binjai**

## STRUKTUR ORGANISASI DI PT PLN (PERSERO) UP3 BINJAI



\*Asman = Assistant Manager

\*TL = Team Leader

**Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT PLN (Persero) UP3 Binjai**

#### **4.1.2.2 Pembagian Tugas**

Uraian tugas dan tanggung jawab setiap bagian pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai hanya penulis batasi pada jabatan Manager, Assisstant Manager Keuangan dan Umum, Team Leader Keuangan dan Akuntansi serta staff akuntansi yang terdiri atas jabatan Officer Keuangan dan Umum serta Junior Officer Keuangan dan Akuntansi. Uraian jabatan tersebut dapat dapat dilihat sebagai berikut:

##### **1. Manager UP3**

Bertanggung jawab kepada General Manager dalam memastikan pengelolaan konstruksi, operasi, dan pemeliharaan untuk distribusi, pembangkit skala kecil, serta niaga dan pelayanan pelanggan, pengadaan barang dan jasa, serta membina pengelolaan Unit Layanan secara optimal untuk menghasilkan mutu dan keandalan berorientasi kepada kebutuhan pelanggan dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan yang berbasis aspek keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan, dan keamanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengelolaan hubungan kerja sama dengan pihak lain dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pengelolaan penyediaan tenaga listrik, terkait hubungan dengan *stakeholder*. Rincian tugas pokok sebagai berikut:

- a. Merencanakan dan menyusun program kerja UP3 sebagai pedoman kerja dan bahan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Unit Pelaksana;
- b. Mengendalikan tata kelola konstruksi, operasi, dan pemeliharaan pembangkit dan distribusi secara efektif dan menghasilkan mutu dan keandalan sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan dengan berbasis aspek keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan, dan keamanan;

- c. Mengevaluasi dan melaksanakan strategi pemasaran dan pengembangan pelayanan pelanggan serta pengelolaan *contact center* untuk meningkatkan penjualan tenaga listrik dan kepuasan pelanggan;
- d. Mengevaluasi dan melaksanakan strategi dalam upaya menurunkan gangguan pembangkit dan jaringan distribusi, susut jaringan, penurunan piutang, dan melaksanakan *revenue assurance* untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- e. Mengevaluasi dan mengendalikan proses pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan manajemen *inventory material* pembangkit dan distribusi untuk kegiatan pemasaran (konstruksi) dan pemeliharaan;
- f. Mengembangkan hubungan kerja sama dengan pihak lain dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka mendukung pengelolaan penyediaan tenaga listrik;
- g. Mengendalikan dan mengevaluasi proses pengelolaan keuangan dan umum;
- h. Mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di unitnya dengan melaksanakan *Coaching, Mentoring, and Counseling (CMC)* selaras dengan strategi dan kebijakan *human capital korporat*.

## **2. Asisstant Manager Keuangan dan Umum**

Bertanggung jawab mengelola dan mengendalikan kegiatan bidang keuangan dan umum yang meliputi anggaran, keuangan, akuntansi dan umum untuk

mendukung laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta mencapai target kinerja sesuai tujuan perusahaan. Rincian tugas pokok sebagai berikut:

- a. Memverifikasi dan validasi terhadap kelengkapan transaksi pembayaran dan pajak
- b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pencatatan transaksi keuangan dan akuntansi
- c. Mengelola Anggaran Investasi, Anggaran Operasi, *Cash Card (Petty Cash)*
- d. Mengkoordinir dan monitoring penyelesaian tindak lanjut audit
- e. Mengelola peningkatan Intergritas Layanan Publik (ILP), Kehumasan dan hubungan kerja sama dengan pihak eksternal, *stakeholder* untuk berkoordinasi dalam rangka mendukung pengelolaan penyediaan tenaga listrik
- f. Mengelola kegiatan CSR dan penyelesaian piutang PKBL
- g. Melakukan monitoring operasional kendaraan dinas, fasilitas kantor dan pemeliharaan Gedung
- h. Membina dan mengembangkan kompetensi SDM melalui *Coaching, Mentoring, dan Counseling* untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan.
- i. Mengelola program kerja yang menjadi tanggung jawab jabatannya selaras dengan *Good Corporate Governance (GCG)*, kebijakan risiko, kebijakan kepatuhan, kebijakan K3L, dan sistem manajemen terintegrasi yang diterapkan pada unit kerjanya.
- j. Melaksanakan pekerjaan lain sesuai penugasan yang diberikan atasan

### 3. Team Leader Keuangan dan Akuntansi

Mengkoordinir proses akuntansi dan keuangan untuk menjamin terpenuhinya tertib administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rincian tugas pokok sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengelolaan fungsi keuangan dan akuntansi
- b. Menyiapkan data pendukung RKAU untuk bagian keuangan, SDM, dan administrasi
- c. Melaksanakan rekonsiliasi data dengan fungsi terkait atas pendapatan, bank, hutang-piutang, persekot dinas, dan PUMP-KPR/BPRP
- d. Menyiapkan rincian biaya di ULP untuk rencana alokasi dana operasional
- e. Memverifikasi dan validasi terhadap kelengkapan transaksi pembayaran
- f. Memastikan berkas fisik penagihan telah sesuai dengan tagihan yang disubmit di aplikasi vendor invoice portal
- g. Membina dan mengembangkan kompetensi SDM melalui Coaching, Mentoring, dan Counseling untuk memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan.
- h. Mengelola program kerja yang menjadi tanggung jawab jabatannya selaras dengan *Good Corporate Governance (GCG)*, kebijakan risiko, kebijakan kepatuhan, kebijakan K3L, dan sistem manajemen terintegrasi yang diterapkan pada unit kerjanya.

- i. Melaksanakan penugasan/pekerjaan lain yang diberikan oleh atasan (dalam lingkup kedinasan) yang bertujuan untuk peningkatan kinerja, *brand image* serta *value creation*.
- j. Mengelola perpajakan transaksi di UP3
- k. Mengelola manajemen risiko bagian keuangan dan umum di UP3
- l. Melakukan inventarisasi Aktiva Tetap, Pekerjaan Dalam Pelaksanaan (PDP) dan Persediaan Material
- m. Mengevaluasi dan mengusulkan penghapusan ATTB, Persediaan Material dan Limbah
- n. Melakukan monitoring pengelolaan pajak

#### **4. Officer Kinerja Keuangan dan Umum**

Mengkoordinir kelancaran pengelolaan dan pengendalian kegiatan bidang administrasi dan keuangan yang meliputi kesekretariatan, anggaran, keuangan, dan akuntansi untuk mendukung laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta mencapai target kinerja sesuai tujuan Perusahaan. Rincian tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyiapkan laporan HCR OCR
- b. Menyiapkan laporan pengelolaan komunikasi
- c. Menyiapkan laporan pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL)

- d. Melaksanakan kegiatan pencatatan transaksi keuangan
- e. Mengkoordinir dan monitoring penggunaan anggaran investasi, anggaran operasi, dan cash budget
- f. Mengelola realisasi penyerapan anggaran
- g. Monitoring operasional kendaraan dinas, sarana, prasarana kantor, dan SPPD
- h. Menyiapkan pelaksanaan sertifikasi aset
- i. Melaksanakan pengelolaan kegiatan administrasi SDM
- j. Mengelola program kerja yang menjadi tanggung jawab jabatannya selaras dengan *Good Corporate Governance (GCG)*, kebijakan risiko, kebijakan kepatuhan, kebijakan K3L, dan sistem manajemen terintegrasi yang diterapkan pada unit kerjanya.
- k. Melaksanakan penugasan/pekerjaan lain yang diberikan oleh atasan (dalam lingkup kedinasan) yang bertujuan untuk peningkatan kinerja, *brand image* serta *value creation*.

##### **5. Junior Officer Keuangan dan Akuntansi**

Mengawasi cash flow dan pembayaran keuangan sesuai dengan ketentuan untuk kelancaran kegiatan perusahaan. Rincian tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun Cash Budget dan Cash Flow
- b. Membuat seluruh laporan transaksi keuangan perusahaan
- c. Membuat daftar pelayanan pembayaran

- d. Memonitor realisasi anggaran
- e. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi untuk rencana pembayaran
- f. Mengarsipkan dokumen keuangan Dokumen Laporan keuangan
- g. Mengelola program kerja yang menjadi tanggung jawab jabatannya selaras dengan *Good Corporate Governance (GCG)*, kebijakan risiko, kebijakan kepatuhan, kebijakan K3L, dan sistem manajemen terintegrasi yang diterapkan pada unit kerjanya.
- h. Melaksanakan penugasan/pekerjaan lain yang diberikan oleh atasan (dalam lingkup kedinasan) yang bertujuan untuk peningkatan kinerja, *brand image* serta *value creation*.

#### **4.1.3 Klasifikasi Aktiva Tetap pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai**

Aktiva tetap di PT PLN (Persero) UP3 Binjai diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan jenisnya. Berdasarkan fungsinya, aset tetap di PT PLN (Persero) dibagi sebagai berikut:

1. Pembangkitan PLTD
2. Sistem Distribusi
3. Tata Usaha Langgan
4. Gudang & Persediaan Bahan
5. Wisma & Rumah Dinas
6. Sistem Telekomunikasi

Sedangkan berdasarkan jenisnya, aktiva tetap di PT PLN (Persero) UP3 Binjai terbagi atas:

1. Tanah & hak atas tanah
2. Bangunan dan Kelengkapan Halaman
3. Instalasi dan Mesin
4. Jaringan Distribusi
5. Gardu Distribusi
6. Perlengkapan Lain-lain Distribusi
7. Perlengkapan Pengolahan Data
8. Perlengkapan Telekomunikasi
9. Perlengkapan Umum
10. Kendaraan Bermotor dan Alat yang Mobile

Untuk penelitian ini, klasifikasi aset tetap yang akan digunakan adalah berdasarkan jenisnya yaitu jenis gardu distribusi aset trafo/transformator.

#### **4.1.4 Kebijakan Aktiva Tetap di PT PLN (Persero) UP3 Binjai**

Kebijakan Aktiva Tetap yang berlaku di PT PLN (Persero) UP3 Binjai adalah sebagai berikut:

##### **4.1.4.1 Pengakuan Aktiva Tetap**

Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 142.P/DIR/2021 Tanggal 30 Juni 2021 tentang Batasan Beban Operasi dan Biaya Investasi PT PLN (Persero) yang memperhatikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK),

aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari 1 (satu) periode. Biaya perolehan awal aset tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada aset perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam kebijakan akuntansi.

Biaya utama dalam perolehan awal aset diambil dari biaya investasi yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) yang mana memiliki ciri-ciri dapat menambah kapasitas aset, meningkatkan umur manfaat aset, meningkatkan kualitas *output* aset, menambah dan/atau memperoleh aset dan secara teknis dan nilai ekonomi memiliki manfaat yang dirasakan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun. Sementara biaya selanjutnya dapat diperoleh dari biaya investasi dan/atau biaya operasi yang dikapitalisasi menjadi aset tetap yang di mana biaya operasi tersebut memenuhi kriteria seperti biaya investasi di atas. Aktiva tetap yang akan dianalisis adalah aktiva tetap peroleh tahun 2019.

#### **4.1.4.2 Pengukuran Aktiva Tetap**

Pengukuran aktiva tetap pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai dibagi dua yaitu pengukuran saat pengakuan dan pengukuran setelah pengakuan. Berikut penjelasannya:

## **1. Pengukuran Saat Pengakuan**

Berdasarkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) No. 142.P/DIR/2021 Tanggal 30 Juni 2021 tentang Batasan Beban Operasi dan Biaya Investasi PT PLN (Persero) yang memperhatikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), aset tetap diperoleh dari biaya investasi yang memenuhi definisi aset tetap dan kriteria pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai aset tetap. Jenis biaya investasi yang diakui dalam perolehan aset yaitu pengeluaran penambahan dan/atau perluasan aset tetap dapat menambah nilai perolehan aset tetap sepanjang memenuhi kriteria pengeluaran dan batasan materialistis; dilakukan terhadap barang-barang bergerak atau tidak bergerak serta Pembangunan sarana dan prasarana PLN dan pengadaan material cadang. Batasan materialistis yang dimaksud adalah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

## **2. Pengukuran Setelah Pengakuan**

Ada dua model pengukuran aset tetap setelah pengakuan yang digunakan PT PLN (Persero) UP3 Binjai yaitu:

- a. Model biaya, di mana setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai (ARPN)
- b. Model revaluasi, di mana aset yang telah mengalami revaluasi aset dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

#### 4.1.4.3 Penyusutan Aktiva Tetap

Sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0040.P/DIR/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 tentang Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap dan Perhitungan Biaya Penyusutan Aset Tetap PT PLN (Persero), penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset selama umur manfaatnya. Jumlah tersusutkan adalah biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dikurangi nilai residunya. Sementara umur manfaat adalah periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh entitas, atau jumlah produksi atau unit serupa dari aset yang diperkirakan akan diperoleh dari suatu aset entitas. Sedangkan nilai residu dari aset adalah estimasi jumlah yang dapat diperoleh Perusahaan saat ini dari aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaat.

Ketentuan perhitungan penyusutan aset tetap yaitu:

- a. Perhitungan biaya penyusutan aset tetap didasarkan atas masa manfaat dari tiap jenis aset tetap yang dihitung secara bulanan/tahunan dan pembebanannya dilakukan tiap akhir periode pembukuan.
- b. Penyusutan aset tetap dihitung sejak bulan pengoperasian dan/atau bulan perolehan aset tetap.

Namun dalam Peraturan Direksi tersebut di atas, rumus perhitungan beban penyusutan aset tetap tidak memperhitungkan nilai residu. Metode yang digunakan dalam perhitungan beban penyusutan aset tetap adalah metode garis lurus. Rumus yang terdapat di dalam Perdir tersebut yaitu:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Nilai perolehan}}{\text{Umur Manfaat}} \times \frac{\text{Bulan Perolehan}}{12}$$

#### 4.1.4.4 Penghentian Aktiva Tetap

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara serta Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 1233.K/DIR/2011 tanggal 05 Agustus 2011 tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap PT PLN (Persero), disebutkan bahwa penghapusbukuan dilakukan karena:

- a. Pemindahtanganan;
- b. Kondisi tertentu, maksudnya hilang, musnah, rusak yang tidak dapat dipindahtangankan (*total lost*), biaya pemindahtangannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan tersebut, dibongkar atau dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain yang direncanakan dalam RKAP serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, aktiva tetap tersebut tidak lagi menjadi milik atau dikuasai BUMN.

Aktiva tetap yang diusulkan untuk dihapus akan disebut sebagai Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB), sehingga posisinya di laporan keuangan akan berbeda dari Aktiva Tetap yang masih aktif.

#### 4.1.4.5 Pengungkapan Aktiva Tetap

Aktiva Tetap PT PLN (Persero) UP3 Binjai disajikan dalam Laporan Keuangan jenis Laporan Neraca. Laporan Keuangan PLN menggunakan aplikasi SAP (*System Application and Product*) dan juga menggunakan Laporan Keuangan manual yang menampilkan lampiran detail-detail komponen data pendukung yang terbit per Triwulan, Semester dan Akhir Tahun. Komponen data pendukung tersebut antara lain:

1. Rincian Aset Tetap per Fungsi dan Per Jenis yang berisi saldo awal tahun (saldo akhir tahun sebelumnya) ditambah penambahan aset, pengurangan ke ATTB, pengurangan karena relokasi dan koreksi lainnya.
2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per Fungsi dan Per Jenis yang berisi saldo awal tahun (saldo akhir tahun sebelumnya) ditambah penambahan akumulasi penyusutan aset, pengurangan ke ATTB, pengurangan karena relokasi dan koreksi lainnya.
3. Daftar Penambahan Aset Tetap per Fungsi dan Per Jenis yang berisi penambahan aset karena Pekerjaan Dalam Penyelesaian (PDP), pembelian langsung, penerimaan aset dari unit lain, hibah, kapitalisasi biaya pemeliharaan dan lainnya yang diperoleh pada tahun berjalan.
4. Daftar Penambahan Akumulasi Penyusutan Per Fungsi dan Per Jenis yang berisi penambahan biaya penyusutan aset tetap pada tahun berjalan.
5. Rincian Akumulasi Rugi Penurunan Nilai (ARN) yang berisi saldo awal tahun, penambahan serta pengurangan pada tahun berjalan.

6. Total ATTB per Fungi dan Per Jenis yang berisi saldo awal tahun, penarikan aktiva tetap dan penghapusan ATTB.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pengakuan Aktiva Tetap**

Menurut PSAK No. 16, biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu.

Di PT PLN (Persero) UP3 Binjai, dokumen-dokumen penting yang harus dimiliki agar sebuah pekerjaan diakui sebagai aset tetap yaitu:

1. Kontrak Pekerjaan
2. Laporan Kemajuan Kerja
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Selesai (BAPPS)
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai (BASTPS)
5. TUG 9 (Tata Usaha Gudang/pengeluaran material)
6. Daftar Pertanggungjawaban Material (berisi daftar material dan jasa pasang)
7. Bon Pengantar
8. Surat Jalan
9. Surat Asal-usul Barang
10. Garansi Barang
11. TUG 3 (Tata Usaha Gudang/slip penerimaan barang)

## 12. TUG 4 (Tata Usaha Gudang/Berita Acara Pemeriksaan Barang)

Di PT PLN (Persero) UP3 Binjai, biaya perolehan yang dimaksud dalam PSAK No. 16 tertuang dalam dokumen Kontrak Pekerjaan melalui proses pengadaan barang dan jasa. Kontrak pekerjaan tersebut memuat daftar pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan oleh vendor (pihak ke-2) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada di kontrak. Setelah pekerjaan selesai, keseluruhan rincian biaya material, jasa pasang hingga PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terinci dalam Daftar Pertanggungjawaban Material dan di-sah-kan dengan adanya dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai (BASTPS) yang ditandatangani oleh Manajer UP3 (pihak ke-1) dengan Vendor (pihak ke-2) yang melaksanakan pekerjaan pemasangan aset tetap tersebut.

Dengan adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai (BASTPS) dan dokumen-dokumen pendukung lain maka bagian akuntansi dapat membukukan pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi aset tetap. Nilai yang tertuang dalam BASTPS tersebut menjadi nilai aset tetap yang baru. Dan nilai inilah yang akan dibayarkan Perusahaan kepada vendor menggunakan kas Perusahaan. Dengan demikian, biaya perolehan terbukti dapat diukur secara andal karena telah sesuai dengan dokumen pendukung perolehan aset tetap.

**Tabel 4.1 Perbandingan Pengakuan Aset Tetap PSAK No. 16 dengan PT  
PLN (Persero) UP3 Binjai**

<b>PSAK No. 16</b>	<b>PT PLN (Persero) UP3 Binjai</b>	<b>Keterangan</b>
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau, jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan pada aset ketika pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu	Perusahaan mengakui adanya suatu aset dan memperoleh aset menggunakan kas Perusahaan yang didukung dengan adanya dokumen pendukung yang sesuai dengan syarat kontrak.	Sesuai

*Sumber: Data yang Diolah Peneliti (2023)*

## **4.2.2 Pengukuran Aktiva Tetap**

### **4.2.2.1 Pengukuran Saat Pengakuan**

Berdasarkan PSAK No. 16, biaya perolehan aset tetap diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon dan potongan lain. Beberapa cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan pembelian secara tunai, pembelian secara angsuran, ditukar dengan surat berharga, ditukar dengan aset tetap lain dan diperoleh dari donasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff akuntansi PT PLN (Persero) UP3 Binjai, pada tahun 2019 aset tetap diperoleh dengan cara proses

pengadaan barang dan jasa, kapitalisasi pemakaian persediaan dan kapitalisasi biaya pemeliharaan.

Berikut contoh pengakuan aktiva tetap trafo pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai yang sudah memenuhi syarat di atas melalui pembelian secara tunai yang diperoleh dari Pekerjaan Dalam Penyelesaian (PDP):

**Tabel 4.2 Rincian Pengakuan Aset Tetap PT PLN (Persero) UP3 Binjai dari PDP**

No	Nomor Aset	Nama Aset	Jumlah	Satuan	Nilai Aset		
					Biaya Material + Jasa (Rp)	Biaya PPN 10%	Total Nilai Aset
1	1000107287	TRAFO 3 PHS 100 KVA	1	U	<b>53.768.795</b>	<b>5.376.879</b>	<b>59.145.674</b>
2	1000107277	TRAFO 3 PHS 250 KVA	1	U	<b>75.277.949</b>	<b>7.527.795</b>	<b>82.805.744</b>

*Sumber: Data yang Diolah Peneliti (2023)*

Dari tabel 4.2 di atas, dapat terlihat bahwa pengakuan aset tetap pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai sudah sebesar total nilai biaya perolehan yang terdiri atas biaya material, biaya jasa dan biaya PPN di antaranya 1 (satu) unit trafo 3 fasa 200 KVA senilai Rp 59.145.674 (lima puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dan 1 (satu) unit trafo 3 fasa 250 KVA senilai Rp82.805.744 (delapan puluh dua juta delapan ratus lima ribu tujuh ratus

empat puluh empat rupiah). Berikut jurnal yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Binjai saat melakukan pengakuan aset tetap yang diperoleh dari Pekerjaan Dalam Penyelesaian (PDP).

**Tabel 4.3 Jurnal Transaksi Pengakuan Aset Tetap PT PLN (Persero) UP3**

**Binjai**

<b>Tanggal</b>	<b>Nama Akun</b>	<b>Dr</b>	<b>Cr</b>
12.06.2019	Aset Tetap – Gardu Distribusi	<b>59.145.674</b>	
	Pekerjaan Dalam Penyelesaian		<b>59.145.674</b>

*Sumber: Data yang Diolah Peneliti (2023)*

**Tabel 4.4 Jurnal Transaksi Pengakuan Aset Tetap PT PLN (Persero) UP3**

**Binjai**

<b>Tanggal</b>	<b>Nama Akun</b>	<b>Dr</b>	<b>Cr</b>
31.05.2019	Aset Tetap – Gardu Distribusi	<b>82.805.744</b>	
	Pekerjaan Dalam Penyelesaian		<b>82.805.744</b>

*Sumber: Data yang Diolah Peneliti (2023)*

Pada PSAK No. 16 paragraf 8, disebutkan bahwa suku cadang, peralatan siap pakai dan peralatan pemeliharaan diakui sesuai dengan pernyataan ini ketika memenuhi definisi dari aset tetap. Namun jika tidak maka suku cadang peralatan siap pakai dan peralatan pemeliharaan diklasifikasikan sebagai persediaan. Berikut jurnal yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Binjai saat melakukan pengakuan aset tetap yang dikapitalisasi langsung dari beban pemakaian persediaan material:

**Tabel 4.5 Rincian Pengakuan Aset Tetap PT PLN (Persero) UP3 Binjai**  
**Perolehan dari Kapitalisasi Pemakaian Persediaan Material**

No	Nomor Aset	Nama Aset	Jumlah	Satuan	Nilai Aset		
					Biaya Material + Jasa (Rp)	Biaya PPN 10%	Total Nilai Aset
1	1000106704	TRAFO 3 PHS 50 KVA	1	U	<b>21.692.440</b>	<b>0</b>	<b>21.692.440</b>

*Sumber: Data yang Diolah Peneliti (2023)*

**Tabel 4.6 Jurnal Transaksi Pengakuan Aset Tetap PT PLN (Persero) UP3**  
**Binjai**

Tanggal	Nama Akun	Dr	Cr
03.05.2019	Aset Tetap – Gardu Distribusi	<b>21.692.440</b>	
	Beban pemakaian material transformator		<b>21.692.440</b>

*Sumber: Data yang Diolah Peneliti (2023)*

Dari tabel 4.3 dan 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa beberapa penambahan aset tetap transformator/trafo PT PLN (Persero) UP3 Binjai pada tahun 2019 diperoleh dari cara pembelian di antaranya:

1. PDP (Pekerjaan Dalam Penyelesaian) yaitu pembelian yang dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa di unit sendiri menggunakan anggaran investasi. Total biaya pembelian tersebut diakui sebagai aset tetap pada saat

terjadinya penyerahan pekerjaan selesai sebesar 100% melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) diikuti dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang telah disebutkan di atas. Nilai total aset tetap yang diperoleh dari PDP adalah sebesar Rp 59.145.674,00 dan Rp82.805.744,00.

2. Kapitalisasi Pemakaian Persediaan Material adalah perolehan aset tetap dari beban pemakaian material yang menggunakan biaya operasi. Nilai total aset tetap yang diperoleh dari kapitalisasi pemakaian persediaan material adalah sebesar Rp21.692.440,00. Tidak adanya PPN dikarenakan perolehan aset tetap tersebut langsung diambil dari nilai persediaan material.

Pada tahun 2019, ditemukan bahwa ada jenis aset gardu distribusi yaitu dengan material distribusi utamanya adalah transformator/trafo di mana dengan jenis trafo yang sama namun memiliki nilai perolehan berbeda satu sama lain. Contohnya yaitu pada Trafo 3 Phasa 100 KVA berikut:

**Tabel 4.7 Perbandingan Nilai Perolehan Aset**

<b>Tanggal Aset</b>	<b>No Aset</b>	<b>Nama Aset</b>	<b>Nilai Perolehan</b>
08.08.2019	1000110400	Trafo 3 Phasa 100 KVA	<b>165.734.195</b>
08.04.2019	1000110457	Trafo 3 Phasa 100 KVA	<b>194.299.873</b>

*Sumber: Data yang Diolah Peneliti (2023)*

Di antara kedua aset tersebut di atas, ditemukan bahwa adanya selisih nilai aset tetap sebesar Rp28.565.679. Setelah dilakukan penelitian, dari wawancara dengan staff akuntansi dijelaskan bahwa perbedaan nilai perolehan aset tersebut disebabkan oleh adanya material pendukung atau aksesoris dalam pemasangan material

distribusi utama (MDU). MDU yang dimaksud adalah trafo sedangkan material pendukung atau aksesorisnya di antaranya kabel NYY, lightning arrester pinpost isolator, suspension isolator, fuse cut out, rak trafo dan material aksesoris lain yang mendukung pemasangan trafo. Banyaknya jumlah material aksesoris yang terpasang antara satu trafo dengan trafo yang lain juga mempengaruhi nilai perolehan aset tersebut. Selain itu adanya pengaruh jasa yang dibutuhkan untuk pemasangan aset mungkin berbeda karena adanya pengaruh jumlah material yang dipasang juga turut mempengaruhi nilai perolehan aset. Beberapa faktor tersebut di atas lah yang membuat nilai perolehan suatu aset, meski aset utama sama namun nilai perolehan berbeda.

Dengan demikian, nilai perolehan aset sesuai dengan peraturan PSAK No. 16 di mana harga perolehan adalah harga pembelian ditambah dengan semua biaya lain yang menyertai sampai aset digunakan dan dikurangi diskon atau porongan.

Untuk Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan adalah perolehan aset tetap dari beban jasa borong yang menggunakan biaya operasi. Nilai total aset tetap yang diperoleh dari kapitalisasi biaya pemeliharaan tahun 2019 adalah sebesar Rp3.513.036.841,00 di mana jenis asetnya adalah bangunan & kelengkapan halaman dan jaringan distribusi sementara khusus untuk jenis gardu distribusi tidak ditemukan kapitalisasi biaya pemeliharaan pada tahun 2019.

Berikut penambahan perolehan aset tetap PT PLN (Persero) UP3 Binjai tahun 2019:

**Tabel 4.8 Perolehan Aset Tetap Tahun 2019 di PT PLN (Persero) UP3 Binjai**

<b>No</b>	<b>Jenis Aktiva Tetap</b>	<b>PDP Unit (Lainnya)</b>	<b>Kapitalisasi Pemakaian Persediaan Material</b>	<b>Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Tanah dan hak atas tanah	580.285.342			<b>580.285.342</b>
2.	Bangunan & kelengkapan halaman	3.017.839.927		3.470.427.650	<b>6.488.267.577</b>
3.	Instalasi dan mesin	875.785.282			<b>875.785.282</b>
4.	Perlengk. penyaluran tng Listrik				
5.	Jaringan distribusi	141.303.179.755	162.922.914	42.609.191	<b>141.508.711.860</b>
6.	Gardu distribusi	23.962.694.511	2.876.233.232		<b>26.838.927.743</b>
7.	Perlengkapan lain-lain distribusi	34.903.335.854	606.864.941		<b>35.510.200.795</b>
8.	Perlengkapan pengolahan data				
9.	Perlengkapan telekomunikasi				
10.	Perlengkapan umum	380.036.866			<b>380.036.866</b>
11.	Kend. bermotor & alat2 yg mobil	337.260.000			<b>337.260.000</b>
<b>Total</b>		<b>205.360.417.537</b>	<b>3.646.021.087</b>	<b>3.513.036.841</b>	<b>212.519.475.465</b>

*Sumber: Laporan Keuangan PT PLN (Persero) UP3 Binjai per Desember 2019*

**Tabel 4.9 Perbandingan Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap PSAK No. 16 dengan PT PLN (Persero) UP3 Binjai**

<b>PSAK No. 16</b>	<b>PT PLN (Persero) UP3 Binjai</b>	<b>Keterangan</b>
Terdapat beberapa cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan pembelian secara tunai, pembelian secara angsuran, ditukar dengan surat berharga, ditukar dengan aset tetap lain dan diperoleh dari donasi.	Cara memperoleh aset tetap di tahun 2019 adalah dengan pembelian secara tunai, seperti dari PDP, Kapitalisasi Pemakaian Persediaan Material dan Kapitalisasi Biaya Pemeliharaan	Sesuai

*Sumber: Data yang Diolah Peneliti (2023)*

#### **4.2.2.2 Pengukuran Setelah Pengakuan**

Ada dua model pengukuran setelah pengakuan aset yang diakui PSAK No. 16 di antaranya:

1. Model biaya, di mana setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai (ARPN). Laporan keuangan yang dimiliki PT PLN (Persero) UP3 Binjai yang berada pada posisi neraca, setelah pengakuan aset tetap dicatat maka setelah itu dikurangi akumulasi penyusutan dan kemudian dikurangi dengan akumulasi rugi penurunan nilai (ARPN). Dalam hal ini, aset transformator/trafo tidak mengalami akumulasi rugi penurunan nilai (ARPN). ARPN hanya dilakukan pada aset jenis bangunan dan kelengkapan halaman.

**Tabel 4.10 Penyajian Aset Tetap PT PLN (Persero) UP3 Binjai**

No	Jenis Aktiva Tetap	Aktiva Tetap (Bruto) (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Akumulasi Rugi Penurunan Nilai (ARNP) (Rp)	Aktiva Tetap (Netto) (Rp)
1.	Tanah dan hak atas tanah	47.606.323.526	0	0	4.760.632.3526
2.	Bangunan & kelengkapan halaman	30.248.515.683	-846.814.584	-1.163.716.446	28.237.984.653
3.	Instalasi dan mesin	1.184.614.812	-51.066.942	0	1.133.547.870
4.	Perlengk. penyaluran tng Listrik	848.070.353	-22.920.824	0	825.149.529
5.	Jaringan distribusi	721.479.608.589	-16.833.033.590	0	704.646.574.999
6.	Gardu distribusi	267.784.582.007	-9.418.667.373	0	258.365.914.634
7.	Perlengkapan lain-lain distribusi	268.069.214.760	-9.453.641.605	0	258.615.573.155
8.	Perlengkapan pengolahan data	355.462.778	-214.276.719	0	141.186.059
9.	Perlengkapan telekomunikasi	205.212.580	-14.339.085	0	190.873.495
10.	Perlengkapan umum	8.197.198.806	-7.662.234.360	0	534.964.446
11.	Kend. bermotor & alat2 yg mobil	8.713.303.297	-8.298.173.949	0	415.129.348
<b>Total</b>		<b>1.354.692.107.191</b>	<b>-52.815.169.031</b>	<b>-1.163.716.446</b>	<b>1.300.713.221.714</b>

Sumber: Laporan Keuangan PT PLN (Persero) UP3 Binjai per Desember 2019

2. Model Revaluasi.

Pada paragraf 31 PSAK No. 16, setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap yang nilai wajarnya dapat ditukar secara andal dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir periode pelaporan. Di paragraf 34 PSAK No. 16, frekuensi revaluasi bergantung pada perubahan nilai wajar dari aset tetap yang direvaluasi. Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya, maka revaluasi lanjutan disyaratkan. Beberapa aset tetap mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan dan fluktuatif sehingga perlu direvaluasi secara tahunan. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan, sebaliknya, aset tetap tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali. Berdasarkan informasi dari bagian keuangan dan umum staff akuntansi PT PLN (Persero) UP3 Binjai, revaluasi aset tetap dilaksanakan pada tahun 2018 hanya pada aset bangunan dan kelengkapan halaman. Selain itu revaluasi aset pada PT PLN (Persero) UP3 Binjai dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, sehingga pada tahun 2019 tidak terdapat adanya transaksi revaluasi aset.

**Tabel 4.11 Perbandingan Pengukuran Setelah Pengakuan Aset Tetap PSAK No. 16 dengan PT PLN (Persero) UP3 Binjai**

<b>PSAK No. 16</b>	<b>PT PLN (Persero) UP3 Binjai</b>	<b>Keterangan</b>
Model biaya, di mana setelah pengakuan sebagai aset, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai (ARPN)	Pada laporan keuangan, setelah pengakuan aset tetap dicatat maka setelah itu dikurangi akumulasi penyusutan dan kemudian dikurangi dengan akumulasi rugi penurunan nilai (ARPN)	Sesuai
Model revaluasi. Revaluasi tahunan tersebut tidak perlu dilakukan untuk aset tetap yang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan, sebaliknya, aset tetap tersebut mungkin perlu direvaluasi setiap tiga atau lima tahun sekali.	Revaluasi aset tetap tidak dilakukan pada tahun 2019 karena baru dilakukan pada tahun 2018. Revaluasi dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali karena dipandang perubahan nilai wajarnya tidak signifikan	Sesuai

*Sumber: Data yang diolah Peneliti (2023)*

#### **4.2.3 Penyusutan Aktiva Tetap**

Berdasarkan PSAK No. 16, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh aset tetap disusutkan secara terpisah.

Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain, metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi. Metode penyusutan garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur

manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode unit produksi menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau *output* yang diperkirakan dari aset.

Metode penyusutan yang digunakan oleh PT PLN (Persero) UP3 Binjai adalah metode garis lurus atau disebut dengan PLN *straight line*. Rumus perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus di PT PLN (Persero) UP3 Binjai yaitu:

$$\text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{Nilai perolehan}}{\text{Umur Manfaat}} \times \frac{\text{Bulan Perolehan}}{12}$$

Pada PSAK No. 16 paragraf 57, dijelaskan bahwa umur manfaat aset ditentukan berdasarkan kegunaan yang diperkirakan oleh entitas. Kebijakan manajemen aset dari entitas mungkin mencakup pelepasan aset setelah jangka waktu tertentu atau setelah pemakaian sejumlah proporsi tertentu dari manfaat ekonomik masa depan aset. Oleh karena itu, umur manfaat aset dapat lebih pendek daripada umur ekonomik aset tersebut. Estimasi umur manfaat suatu aset membutuhkan pertimbangan berdasarkan pengalaman entitas terhadap aset yang serupa.

PT PLN (Persero) UP3 Binjai tidak mengakui nilai residu pada perhitungan penyusutannya melainkan dengan menggunakan nilai perolehan suatu aset dibagi dengan umur manfaat aset (yang sudah ditentukan umurnya di Perdir PLN) dikali dengan umur yang dipakai pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah bulan tahun

berjalan. Umur manfaat pada aset trafo yang telah ditetapkan di PT PLN (Persero) adalah 25 (dua puluh lima) tahun.

Contoh perhitungan nilai penyusutan aset trafo:

1. Pada nomor aset 1000107287 yaitu trafo 3 fasa 100 KVA yang diperoleh pada tanggal 12.06.2019 dengan nilai aset sebesar Rp 59.145.674,00 maka sisa bulan perolehan aset tersebut pada tahun 2019 adalah selama 7 (tujuh) bulan. Sehingga didapat perhitungan penyusutan aset tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Beban Penyusutan} &= \frac{\text{Nilai perolehan}}{\text{Umur Manfaat}} \times \frac{\text{Bulan Perolehan}}{12} \\ &= \frac{\text{Rp}59.145.674}{25} \times \frac{7}{12} \\ &= \text{Rp}1.380.066 \end{aligned}$$

2. Pada nomor aset 1000107277 yaitu trafo 3 fasa 250 KVA yang diperoleh pada tanggal 31.05.2019 dengan nilai aset sebesar Rp 59.145.674,00 maka sisa bulan perolehan aset tersebut pada tahun 2019 adalah selama 8 (delapan) bulan. Sehingga didapat perhitungan penyusutan aset tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Beban Penyusutan} &= \frac{\text{Nilai perolehan}}{\text{Umur Manfaat}} \times \frac{\text{Bulan Perolehan}}{12} \\ &= \frac{\text{Rp}82.805.744}{25} \times \frac{8}{12} \\ &= \text{Rp}2.208.153 \end{aligned}$$

3. Pada nomor aset 1000106704 yaitu trafo 3 fasa 50 KVA yang diperoleh pada tanggal 03.05.2019 dengan nilai aset sebesar Rp21.692.440,00 maka sisa bulan

perolehan aset tersebut pada tahun 2019 adalah selama 8 (delapan) bulan.

Sehingga didapat perhitungan penyusutan aset tersebut adalah sebagai berikut:

$\begin{aligned} \text{Beban Penyusutan} &= \frac{\text{Nilai perolehan}}{\text{Umur Manfaat}} \times \frac{\text{Bulan Perolehan}}{12} \\ &= \frac{\text{Rp21.692.440}}{25} \times \frac{8}{12} \\ &= \text{Rp578.465} \end{aligned}$
--

Pada PSAK No. 16 paragraf 48, dijelaskan bahwa beban penyusutan untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut termasuk dalam jumlah tercatat aset lain. Di PT PLN (Persero) UP3 Binjai sendiri, beban penyusutan juga tercatat pada laporan laba rugi tahun berjalan, yang akan diakumulasikan dengan beban penyusutan tahun-tahun sebelumnya pada laporan neraca yang berbentuk akumulasi penyusutan. Jurnal yang terbentuk yaitu:

Dr	Beban Penyusutan	xxx
Cr	Akumulasi Penyusutan	xxx

Pada aset yang hingga umur manfaat ekonominya telah habis namun masih dapat dipergunakan dalam kegiatan usaha Perusahaan maka beban penyusutannya dihitung 0 (nol) dan tidak mempengaruhi laba rugi dan akumulasi penyusutan. Aset tersebut masih tetap tercatat dalam neraca.

**Tabel 4.12 Perbandingan Penyusutan Aset Tetap PSAK No. 16 dengan PT PLN (Persero) UP3 Binjai**

<b>PSAK No. 16</b>	<b>PT PLN (Persero) UP3 Binjai</b>	<b>Keterangan</b>
Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya	Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya	Sesuai
Metode tersebut antara lain, metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi	Metode yang digunakan adalah metode garis lurus	Sesuai
Beban penyusutan untuk setiap periode diakui dalam laba rugi, kecuali jika beban tersebut termasuk dalam jumlah tercatat aset lain	Beban penyusutan disajikan dalam laporan laba rugi dan diakumulasikan di neraca dalam bentuk akumulasi penyusutan	Sesuai

*Sumber: Data diolah Peneliti (2023)*

#### **4.2.4 Penghentian Aktiva Tetap**

Menurut PSAK No. 16 paragraf 67, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya yaitu pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya. Keuntungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai pendapatan. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai cara (contohnya: dijual, disewakan dalam sewa pembiayaan atau disumbangkan).

Dari penelitian ini dan informasi dari staff akuntansi PT PLN (Persero) UP3 Binjai, ditemukan bahwa ada dua kali pengusulan untuk aset tetap yang akan dihapus pada tahun 2019 yaitu:

- Usulan Penghapusan aset semester 1 = Rp4.150.993.042
- Usulan Penghapusan aset semester 2 = Rp 4.713.845.774
- Total usulan penghapusan aset 2019 = Rp8.864.838.816

Di PT PLN (Persero) UP3 Binjai, Aset Tetap yang diusulkan untuk dihapus disebut ATTB (Aktiva Tetap Tidak Beroperasi). Syarat-syarat untuk mengubah Aset Tetap menjadi ATTB yaitu aset tetap berusia minimal lima (5) tahun, sudah tidak dapat dipergunakan lagi atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, serta nilai buku sudah habis.

Saat usulan penghapusan ATTB ini dilakukan, usulan tersebut tidak langsung sepenuhnya dilaksanakan karena ada beberapa tahap dalam penghapusan aset tetap. Tahap-tahapnya tertuang dalam beberapa formulir yaitu:

1. AE1 -> Pengajuan penarikan AT ke ATTB kepada level 1 (dari UP3 ke Unit Induk)
2. AE2 -> Persetujuan penarikan AT ke ATTB oleh level 1 (Unit Induk menyetujui usulan UP3)
3. AE3 -> Pengajuan penarikan AT kepada Kantor Pusat (dari Unit Induk ke Kantor Pusat)
4. AE4 -> Persetujuan penarikan AT oleh SPI dan Pakta Integritas dari Manajemen

Setelah tahapan-tahapan di atas berjalan, akan ada pemeriksaan terakhir yang dilakukan oleh Dewan Komisaris PLN Pusat untuk benar-benar memastikan apakah Aset Tetap tersebut layak dimasukkan ke dalam usulan penghapusan ATTB. Proses

panjang ini dibuat agar insan PLN menghargai aset-aset yang ada dan memanfaatkannya dengan lebih baik lagi sehingga aset-aset termanfaatkan dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak.

Lalu bagaimana dengan perhitungan penyusutan aset pada aset yang sudah tidak layak lagi digunakan namun masih memiliki umur manfaat aset? Dicontohkan adanya aset trafo yang umur manfaat asetya adalah selama 25 tahun namun pada tahun ke-15, aset trafo tersebut sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan maupun diperbaiki lagi. Maka aset trafo ini diusulkan untuk menjadi ATTB dan terbentuklah jurnal sebagai berikut:

Dr	Akumulasi penyusutan AT	xxx	
Dr	Nilai ATTB		xxx
Dr	Rugi Percepatan Penyusutan AT	xxx	
	Cr	Akumulasi penyusutan ATTB	xxx
	Cr	Nilai perolehan aset tetap	xxx

Dari jurnal yang terbentuk di atas, dapat diketahui bahwa aset tetap yang umur manfaatnya masih ada namun sudah tidak dapat dipergunakan lagi maka akumulasi penyusutannya akan dipercepat dan di-debet ke akun Rugi Percepatan Penyusutan Aset Tetap. Hal ini telah diakomodir dalam Perdir PLN, sehingga perhitungan penyusutan aset tetap sudah tepat.

Namun di samping itu, bagaimana dengan Aset Tetap yang telah layak untuk dikelompokkan ke dalam usulan ATTB tetapi tidak dilaksanakan? Aset tetap ini akan meningkatkan beban pemeliharaan. Ini terjadi karena biaya penyusutan yang

terus tercatat padahal aset tetap tersebut sudah tidak dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan lagi. Hal ini juga mengakibatkan Laporan Keuangan Neraca menjadi kurang akurat karena nilai aset tidak mencerminkan kondisi fisik aset tetap yang sebenarnya. Berdasarkan informasi dari staff akuntansi, usulan pemindahan Aset Tetap menjadi Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) diadakan setiap semester atau dua kali setahun. Oleh karena itu, penulis berharap agar usulan Aset Tetap menjadi Aktiva Tetap Tidak Beroperasi (ATTB) dipercepat dengan mempertimbangkan bahwa Aset Tetap tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga pencatatan Aktiva Tetap pada Neraca menjadi lebih akurat.

**Tabel 4.13 Perbandingan Penghentian Pengakuan Aset Tetap PSAK No. 16 dengan PT PLN (Persero) UP3 Binjai**

PSAK No. 16	PT PLN (Persero) UP3 Binjai	Keterangan
Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya yaitu pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.	Syarat-syarat untuk mengubah Aset Tetap menjadi ATTB yaitu aset tetap berusia minimal lima (5) tahun, sudah tidak dapat dipergunakan lagi atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, serta nilai buku sudah habis.	Sesuai
Metode tersebut antara lain, metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi	Metode yang digunakan adalah metode garis lurus	Sesuai

*Sumber: Data diolah Peneliti (2023)*

#### 4.2.5 Pengungkapan Aktiva Tetap

Menurut PSAK No. 16 paragraf 73, Laporan Keuangan mengungkapkan untuk setiap kelas aset tetap:

1. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; dan
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a. Penambahan;
  - b. Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan dan pelepasan lain;
  - c. Perolehan melalui kombinasi bisnis;
  - d. Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai dengan paragraf 31, 39 dan 40 serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset;
  - e. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48;
  - f. Pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48;
  - g. Penyusutan;
  - h. Selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda,

termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor;

- i. Perubahan lain.

**Tabel 4.14 Perbandingan Penghentian Pengakuan Aset Tetap PSAK No. 16 dengan PT PLN (Persero) UP3 Binjai**

<b>PSAK No. 16</b>	<b>PT PLN (Persero) UP3 Binjai</b>	<b>Keterangan</b>
Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto;	Pengukuran aset menggunakan nilai bruto	Sesuai
Metode penyusutan yang digunakan;	Metode Garis Lurus	Sesuai
Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan	Umur manfaat tersaji otomatis di dalam aplikasi SAP	Sesuai
Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode	Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode tersaji di laporan keuangan	Sesuai
Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penambahan</li> <li>b. Aset yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan</li> </ol>	Laporan keuangan memuat penambahan aset tahun berjalan dan	Sesuai

<p>sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk dijual dan operasi yang dihentikan dan pelepasan lain;</p> <p>c. Perolehan melalui kombinasi bisnis;</p> <p>d. Peningkatan atau penurunan akibat dari revaluasi sesuai dengan paragraf 31, 39 dan 40 serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik dalam penghasilan komprehensif lain sesuai dengan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset;</p> <p>e. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48;</p> <p>f. Pembalikan rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 48;</p> <p>g. Penyusutan;</p> <p>h. Selisih kurs neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dari mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan yang berbeda, termasuk penjabaran dari kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor;</p> <p>i. Perubahan lain</p>	<p>Rugi Penurunan Nilai serta Penyusutan</p>	
--	--	--

*Sumber: Data diolah Peneliti (2023)*

Berdasarkan tabel 4.13 dijelaskan bahwa seluruh peraturan yang ada di PSAK No. 16 tentang Aset Tetap telah sesuai pengaplikasian di PT PLN (Persero) UP3 Binjai. Namun ada catatan kecil yaitu:

1. Catatan atas Laporan Keuangan hendaknya memuat metode penyusutan dan umur manfaat aset serta informasi tambahan lain yang dibutuhkan
2. Rugi Penurunan Nilai disajikan dalam lampiran terpisah dari lampiran rincian aset tetap Laporan Keuangan sehingga tidak membingungkan pengguna laporan keuangan. Namun secara hasil adalah sama.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa PSAK No. 16 tentang Aktiva Tetap mulai dari Pengakuan, Pengukuran, Penghentian Pengakuan hingga Pengungkapan Aktiva Tetap di PT PLN (Persero) UP3 Binjai secara garis besar telah berjalan dengan baik dan telah sesuai.

1. PT PLN (Persero) UP3 Binjai mengakui aset tetap jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehannya diukur secara andal. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 16. Biaya perolehannya menggunakan anggaran investasi maupun anggaran operasi hanya jika memenuhi syarat sebagai aset tetap.
2. Metode penyusutan aset tetap di PT PLN (Persero) UP3 Binjai adalah metode garis lurus. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 16. Namun metode garis lurus di PT PLN (Persero) UP3 Binjai tidak menggunakan nilai residu tetapi menggunakan jangka waktu aset mulai dipergunakan.
3. Penghapusan di PT PLN (Persero) UP3 Binjai mengakui jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya yaitu pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Syarat-syarat untuk mengubah Aset Tetap menjadi ATTB yaitu aset tetap berusia minimal lima (5) tahun, sudah tidak dapat dipergunakan

lagi atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, serta nilai buku sudah habis. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 16.

4. Pengungkapan Aset Tetap di PT PLN (Persero) UP3 Binjai disajikan di dalam Laporan Keuangan Neraca telah sesuai dengan PSAK No. 16

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Bagi PT PLN (Persero) UP3 Binjai:
  - a. Catatan atas Laporan Keuangan hendaknya dilampirkan dan memuat metode penyusutan dan umur manfaat aset serta informasi tambahan lain yang dibutuhkan
  - b. Rugi Penurunan Nilai disajikan dalam lampiran terpisah dari lampiran rincian aset tetap Laporan Keuangan sehingga tidak membingungkan pengguna laporan keuangan. Diharapkan cara pencatatan antara Laporan Keuangan dan Neraca disajikan sama sehingga tidak membingungkan pembaca.
  - c. Sebaiknya ada evaluasi atas ATTB yang diusulkan, sehingga pencatatan aset tetap lebih akurat.
2. Bagi penulis selanjutnya:
  - a. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi referensi yang baik untuk penelitian selanjutnya.
  - b. Diharapkan tulisan ini dapat mengembangkan ide baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Agusinta, L. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Manajemen*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arum, R. A., & Ibrahim, E. C. (2017). KEBIJAKAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP DAN PENYUSUTAN BERDASARKAN PSAK NO. 16 (revisi 2011) PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XIV MAKASSAR (UNIT USAHA PKS LUWU). *Jurnal Administrasi Negara*, 23(1), 41-52.
- CNN Indonesia (2024). *Apa Itu Research Gap, Pengertian, Jenis, dan Contohnya*. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230901154419-569-993559/apa-itu-research-gap-pengertian-jenis-dan-contohnya#:~:text=Research%20gap%20adalah%20istilah%20yang,di%20lapangan%20maupun%20penelitian%20terdahulu>, diakses tanggal 11 April 2024.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Fariansyah, M. A. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. *Economics Bosowa*, 4(004), 163-176.
- Hariadi, M. B., Nangoi, G. B., & Wangkar, A. (2018). Evaluasi Penerapan Perlakuan Akuntansi Terhadap Aktiva Tetap Berdasarkan PSAK No 16 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malalayang Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).

- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Indonesia, I. A. (2021). Standar akuntansi keuangan.
- Kho, B. (2020). *Pengertian Penyusutan (Depresiasi) dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-penyusutan-depreciation-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penyusutan/>, diakses tanggal 21 Desember 2020.
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., Tanujaya, E., & Hidayat, T. (2024). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK Buku 2*. Penerbit Salemba.
- Megawati, E. (2014). *Perlakuan Akuntansi Atas Aktiva Tetap Berwujud Dan Penyajiannya Pada Laporan Keuangan (Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Gula Meritjan Kediri Periode 2012)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.

- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Nasution, N., (2018). *Penerapan PSAK No. 16 tentang Aset Tetap pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Nur Indriantoro, B. S. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*.
- Pratama, S. H. (2022). *Analisis Penerapan PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap Pada PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Tengah Unit Pelaksana Transmisi Bogor Periode Tahun 2019-2020* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).
- Punusingon, N., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2018). Analisis Penerapan PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap Pada PT. Bank Sulutgo. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(04).
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Putri, D. L. P., & Khotijah, N. (2017). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP DAN PENYAJIANNYA PADA LAPORAN KEUANGAN PT HAKA UTAMA SEJAHTERA SAMPANG. *Aktiva: Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 2(2), 32-47.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Ruata, D. S., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. M. (2018). Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 Pada PT Bank Maluku Maluku Cabang Tobelo. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
- Rudianto. (2017). *Akuntansi Intermediate*. Jakarta: Erlangga.
- Rusdiyanto, R., & Rohmah, N. I. (2017). PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAK NO. 16 PADA PT. SWADAYA GRAHA DI GRESIK.
- Senastri, K. (2020). *Pengertian Akuntansi Keuangan, Fungsi, Tujuan, dan Standarisasinya*. <https://www.finansialku.com/psak/>, diakses tanggal 05 Desember 2020.
- Sia, V. (2022). *Aktiva Tetap: Pengertian, Jenis dan Contoh*. <https://www.jurnal.id/id/blog/aktiva-tetap-pengertian-jenis-dan-cara-memperolehnya>, diakses tanggal 30 Mei 2022.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Thionita, V. (2019). *Definisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Adalah*. <https://www.finansialku.com/psak/>, diakses tanggal 05 Desember 2020
- Ummah, F. R. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Berwujud Dan Hubungannya Terhadap Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan Pada PT Mulya Jatra Sidoarjo. *E-Journal Akuntansi" EQUITY"*, 3(3).
- Wadiyo. (2019). *6 Metode Terbaik untuk Mengakuisisi Aktiva Tetap: Mana Pilihan Anda?* <https://manajemenkeuangan.net/perolehan-aktiva-tetap/>, diakses tanggal 17 Desember 2020.

- Wahyudi, H. (2014). ANALISIS PERLAKUAN AKTIVA TETAP PADA PT. BHANDA GHARA REKSA MEDAN. *Jurnal Bis-A: Jurnal Bisnis Administrasi*, 3(2), 31-41.
- Wibowo dan Abu Bakar. (2018). *Akuntansi Keuangan Dasar 2*. Edisi Ketiga: Cikal Sakti. Jakarta.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Yantika, N. (2017). PENERAPAN KONVERGENSI IFRS PADA PSAK NO. 16 ATAS ASET TETAP BERWUJUD PADA PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY, Tbk. DAN ENTITAS ANAK. *FIN-ACC (Finance Accounting)*, 1(11).
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, KENCANA. Jakarta: Deeplish.